

**DAMPAK PROGRAM INPRES DESA TERTINGGAL BAGI
MASYARAKAT DI DESA SERING KECAMATAN DONRI-DONRI
KABUPATEN DATI II SOPPENG
(1994 – 1997)**



PERPUSTAKAAN GREAT BOOK S. 14300000

| | |
|----------------|-------------|
| Tgl. masuk | 20-1-2002 |
| Daftar | Fah. Sastra |
| Uraian | 2 elus |
| Peny. / | Hadid |
| No. inventaris | 020128. 020 |
| No. Klas | 16581 |

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sastra pada
Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra
Universitas Hasanuddin

Oleh :

ANDI MURTINI

F811 96 005

MAKASSAR

2001

UNIVERSITAS HASANUDDIN**FAKULTAS SASTRA****HALAMAN PENGESAHAN**

Berdasarkan surat tugas Dekan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin
Nomor : 542/J04.101/PP 27/2001, tanggal 31 Januari 2001 dengan ini kami
menyatakan menerima dan menyetujui skripsi ini.

Makassar, Desember 2001

Konsultan I



(Drs. Suriadi Mappangara, M.Hum)

Konsultan II



(Dra. Margriet Lappia Moka, M.S)

Disetujui untuk diteruskan
Kepada Panitia Ujian Skripsi
Dekan
u.b. Ketua Jurusan Sejarah



(Dr. Edward L. Poelinggomang, M.A)

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS SASTRA

Pada hari ini Senin tanggal 10 Desember 2001, Panitia Ujian Skripsi menerima dengan baik Skripsi yang berjudul :

**DAMPAK PROGRAM INPRES DESA TERTINGGAL BAGI
MASYARAKAT DI DESA SERING KECAMATAN DONRI-DONRI
KABUPATEN DATI II SOPPENG
(1994 – 1997)**

Yang diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Sastra Sejarah pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.

Makassar, 10 Desember 2001

Panitia Ujian Skripsi :

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 1. Prof. Dra. Ny. Marrang P. MS | Ketua |
| 2. Dra. Margriet Lappia Moka, MS | Sekretaris |
| 3. Dr. Edward L. Poelinggomang, MA | Penguji I |
| 4. Drs. Daud Limbugau, SU | Penguji II |
| 5. Drs. Suriadi Mappangara, M.Hum | Konsultan I |
| 6. Dra. Margriet Lappia Moka, MS | Konsultan II |



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas hidayah dan taufikNya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Sejarah, Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Sastra, Universitas Hasanuddin Makassar walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana.

Dalam skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak sedikit kesulitan, baik kesulitan pembahasan maupun teknik penyusunan, akan tetapi kesemuanya ini dapat penulis atasi berkat adanya bimbingan dari berbagai pihak, utamanya dosen pembimbing dan dosen pengasuh serta rekan-rekan mahasiswa yang membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama ditujukan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Edward L. Poelinggomang, MA selaku Ketua Jurusan Sejarah pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Bapak Drs. Suriadi Mappangara, M. Hum dan Ibu Dra. Margriet Lappia Moka, MS selaku konsultan I dan konsultan II, dengan penuh kebijaksanaan

dan perhatian yang telah bersedia memberikan bimbingan dan meluangkan waktu untuk memeriksa dan memperbaiki skripsi ini hingga selesai.

3. Segenap dosen pengasuh pada Fakultas Sastra yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
4. Kedua orangtua tercinta yang telah memberikan segala-galanya baik moril maupun materil mulai dari awal perkuliahan hingga selesainya perkuliahan ini.
5. Sanak saudara serta rekan-rekan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak hal yang kurang jelas dari keadaan yang sebenarnya. Semua ini sebagai tanda terbatasnya kemampuan penulis, untuk itu dengan senang hati penulis bersedia menerima kritikan-kritikan yang bersifat penyempurnaan dan saran-saran untuk lebih meningkatkan kemampuan penulis demi kelengkapan dan kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat adanya dalam pembinaan ilmu pengetahuan baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Makassar, Desember 2001

Penulis

DAFTAR ISI

| | | <i>Halaman</i> |
|--------------------------------------|---|----------------|
| HALAMAN JUDUL | | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | | ii |
| HALAMAN PENERIMAAN TIM PENGUJI | | iii |
| KATA PENGANTAR | | iv |
| DAFTAR ISI | | vi |
| DAFTAR TABEL | | viii |
| ABSTRAK | | x |
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| | 1.1 Latar Belakang | 1 |
| | 1.2 Masalah dan Batasan Masalah | 7 |
| | 1.3 Metodologi | 9 |
| BAB II | GAMBARAN UMUM DESA SERING | 14 |
| | 2.1 Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sering | 19 |
| | 2.2 Peran Masyarakat Desa Sering dalam Pembangunan Desa | 25 |
| BAB III | KEMISKINAN DAN PENANGGULANGANNYA | 31 |
| | 3.1 Pengertian Kemiskinan | 31 |
| | 3.2 Pengadaan Program IDT | 34 |
| | 3.3 Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup Program IDT | 36 |
| | 1. Tujuan Program IDT | 36 |
| | 2. Sasaran Program IDT | 37 |
| | 3. Ruang Lingkup Program IDT | 37 |

| | | |
|---------------|--|-----------|
| BAB IV | DAMPAK PROGRAM IDT BAGI MASYARAKAT DESA | |
| | SERING | 42 |
| | 4.1 Masuknya IDT di Desa Sering | 42 |
| | 4.2 Pelaksanaan IDT di Desa Sering 1994-1997 | 46 |
| | 4.3 Faktor Penghambat dan Keberhasilan Pelaksanaan IDT di Desa Sering | 63 |
| | 1. Faktor Penghambat Pelaksanaan IDT di Desa Sering | 63 |
| | 2. Keberhasilan Pelaksanaan IDT di Desa Sering | 67 |
| BAB V | PENUTUP | 84 |
| | A. Kesimpulan | 84 |
| | B. Saran | 86 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 87 |
| | LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | <i>Halaman</i> |
|---|----------------|
| Tabel 1. Distribusi Jumlah Sarana Perhubungan disetiap Dusun di Desa Sering | 17 |
| Tabel 2. Luas Desa Menurut Penggunaannya | 18 |
| Tabel 3. Potensi Sumber Air di Tiap Dusun di Desa sering | 19 |
| Tabel 4. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian | 23 |
| Tabel 5. Keadaan Tingkat Pendidikan | 24 |
| Tabel 6. Tingkat Pendapatan KK Sebelum Pelaksanaan Program IDT | 47 |
| Tabel 7. Realisasi Pengguliran Dana IDT di Desa Sering | 48 |
| Tabel 8. Pengalokasian Penerimaan Uang IDT KSM Tahap I (1994-1995) | 51 |
| Tabel 9. Pengalokasian Penerimaan Uang IDT KSM Tahap II (1995-1996) ... | 51 |
| Tabel 10. Pengalokasian Penerimaan Uang IDT KSM Tahap III (1996-1997) .. | 52 |
| Tabel 11. Jumlah Dana Untuk Tiap Jenis Kegiatan (Usaha) Tahap I (1994-1995) | 56 |
| Tabel 12. Jumlah Dana Untuk Tiap Jenis Kegiatan (Usaha) Tahap II (1995-1996) | 57 |
| Tabel 13. Jumlah Dana Untuk Tiap Jenis Kegiatan (Usaha) Tahap III (1996-1997) | 58 |
| Tabel 14. Pembagian Jenis Kegiatan (Jenis Usaha) Pada setiap KSM Tahap I (1994-1995) | 61 |
| Tabel 15. Pembagian Jenis Kegiatan (Jenis Usaha) Pada setiap KSM Tahap II (1995-1996) | 62 |
| Tabel 16. Pembagian Jenis Kegiatan (Jenis Usaha) Pada setiap KSM Tahap III (1996-1997) | 63 |
| Tabel 17. Kendala Yang Dihadapi Responden Dalam Pelaksanaan IDT..... | 66 |
| Tabel 18. Alasan Responden Menerima Program IDT | 69 |
| Tabel 19. Penilaian Responden Tentang Cukup Tidaknya Dana yang Diterima dengan Jenis Usaha yang Dikelola | 71 |
| Tabel 20. Distribusi Responden tentang Pengembangan Dana IDT yang Diterima | 73 |
| Tabel 21. Ukuran Tingkat Keberhasilan Responden (KK) terhadap Pelaksanaan Program IDT di Desa Sering Tahap I (1994-1995) | 74 |
| Tabel 22. Ukuran Tingkat Keberhasilan Responden (KK) terhadap Pelaksanaan Program IDT di Desa Sering Tahap II (1995-1996) | 75 |

| | |
|--|----|
| Tabel 23. Ukuran Tingkat Keberhasilan Responden (KK) terhadap Pelaksanaan Progran IDT di Desa Sering Tahap III (1996-1997) | 76 |
| Tabel 24. Jenis Usaha yang Tidak Berhasil pada Tahap I (1994-1995) | 77 |
| Tabel 25. Jenis Usaha yang Tidak Berhasil pada Tahap II (1995-1996) | 78 |
| Tabel 26. Jenis Usaha yang Tidak Berhasil pada Tahap III (1996-1997) | 79 |
| Tabel 27. Tingkat Pendapatan Responden (KK) setelah Pelaksanaan IDT TahapI (1994-1995) | 81 |
| Tabel 28. Tingkat Pendapatan Responden (KK) setelah Pelaksanaan IDT TahapII (1995-1996) | 81 |
| Tabel 29. Tingkat Pendapatan Responden (KK) setelah Pelaksanaan IDT TahapIII (1996-1997) | 82 |

ABSTRAK

Keadaan sebagian masyarakat Indonesia umumnya, termasuk di Sulawesi Selatan khususnya pada saat sebelum pelaksanaan Inpres Desa Tertinggal berada dalam taraf kategori masyarakat miskin. Namun pelaksanaan IDT itu sendiri berjalan hanya sebentar dan tidak membawa perubahan cukup berarti. Dari sekian banyak masalah pembangunan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional, maka kemiskinan merupakan masalah yang paling kompleks dan memerlukan berbagai pendekatan untuk memecahkannya.

Dengan upaya peningkatan penanggulangan kemiskinan, maka mulai Repelita VI pemerintah menyelenggarakan program khusus sebagai salah satu bagian dari gerakan dan usaha nasional untuk menanggulangi kemiskinan yang diwujudkan untuk mempercepat upaya mengatasi kemiskinan yang diarahkan secara langsung kepada penduduk miskin di desa tertinggal. Pelaksanaan IDT itu sendiri yang hanya berjalan 3 tahun anggaran yang dimulai untuk tahap I pada tahun anggaran 1994-1995, tahap II tahun 1995-1996, dan tahap III tahun 1996-1997. Sebenarnya program ini cukup mendapat respon yang baik oleh masyarakat Indonesia umumnya termasuk masyarakat Desa Sering di Sulawesi Selatan khususnya.

Pelaksanaan IDT di Desa Sering yang berusaha meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk miskin melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, peningkatan kemampuan permodalan, pengembangan usaha, dan penanggulangan situasi dan kondisi yang menyebabkan timbulnya kemiskinan, ternyata mengalami hambatan antara lain disebabkan oleh kekurangpahaman penduduk Desa Sering khususnya penerima dana IDT tentang arti dan manfaat program IDT tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program IDT di Desa Sering telah berjalan hampir 3 tahun. Secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan atau aturan yang telah ada. Desa sering yang telah menerima program IDT tersebut, baik penyaluran/pencairan dana yang seluruhnya sampai kepada KK miskin, begitu pula dengan penentuan jenis usaha semuanya telah terlaksana dengan cukup baik dengan hasil yang cukup baik pula, walaupun dalam pelaksanaannya mengalami berbagai kendala.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Seluruh usaha pembangunan dimaksudkan untuk membina perubahan kearah yang lebih baik, menumbuhkan suasana untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

GBHN 1993 menempatkan manusia sebagai pusat segenap upaya pembangunan. Sehingga sasaran pembangunan jangka panjang kedua dalam GBHN 1993 menyebutkan :

"Pembangunan Nasional bermuara pada manusia sebagai insan yang harus dibangun kehidupannya dan sekaligus merupakan sumber daya pembangunan yang harus terus ditingkatkan kualitas dan kemampuannya untuk mengangkat harkat dan martabatnya".¹

Dari sekian banyak masalah pembangunan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional, maka kemiskinan merupakan masalah yang paling kompleks dan memerlukan berbagai pendekatan untuk memecahkannya.

Bila dilihat hubungan sebab akibat, maka orang miskin adalah mereka yang serba kurang mampu, sehingga terbelit didalam lingkaran ketidakberdayaan. Rendahnya pendapatan mengakibatkan rendahnya pendidikan dan kesehatan sehingga mempengaruhi produksi.

¹ BPPM dan DEPDAGRI Jakarta, Panduan Program IDT, Jakarta, 1994, halaman 1.

Menurut hasil survey sosial ekonomi nasional (Susenas), bahwa menurunnya jumlah penduduk miskin dari 70 juta atau 60% pada tahun 1970 menjadi 27.2 juta atau 15.2% pada tahun 1990 sebagian merupakan hasil nyata dari pelaksanaan berbagai program pembangunan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah penduduk miskin tersebut, sekalipun telah jauh berkurang, masih cukup besar. Sehingga tidaklah berlebihan jika isu yang meluas tentang rencana pengentasan kemiskinan dikumandangkan oleh Soeharto pada awal tahun 1993 dengan menyatakan bahwa :

"Ditengah-tengah keberhasilan pembangunan masih terdapat sebagian masyarakat Indonesia yang masih berada dibawah kehidupan yang layak sehingga persoalan kemiskinan masih menjadi agenda sangat urgen yang perlu ditanggulangi bersama dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II".²

Hal ini menunjukkan betapa tingginya kemauan pemerintah untuk mewujudkan kemakmuran bagi rakyat pedesaan. Itulah sebabnya pada PJPT-II pemerintah dan rakyat Indonesia telah berketetapan hati untuk mengentaskan kemiskinan sesuai kemampuan yang dimiliki.

Dengan didasari oleh realisasi upaya pengentasan kemiskinan maka dikeluarkan Instruksi Presiden nomor 5 tahun 1993 tentang peningkatan penanggulangan kemiskinan yang menyebutkan :

- "a. bahwa untuk meningkatkan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan di desa-desa tertinggal perlu dipadukan program-program sektoral maupun regional;

² Ibid, halaman 3.

- b. bahwa dalam upaya memobilisasi daya dan dana masyarakat diperlukan program khusus;
- c. bahwa penanggulangan kemiskinan akan melibatkan berbagai instansi pemerintah dan masyarakat yang dalam pelaksanaannya diperlukan keserasian dan keterpaduan langkah;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal seperti di atas, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut Program Inpres Desa Tertinggal (IDT).³

Dengan upaya Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan, maka mulai Repelita VI pemerintah menyelenggarakan program khusus sebagai salah satu bagian dari gerakan dan usaha nasional untuk menanggulangi kemiskinan yang diwujudkan untuk mempercepat upaya mengatasi masalah kemiskinan yang diarahkan secara langsung kepada penduduk miskin di desa tertinggal. Tujuan program ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Inpres RI Tahun 1993 tanggal 27 Desember tentang penanggulangan kemiskinan, yang menyebutkan :

- "a. Memadukan gerak langkah instansi dan lembaga pemerintah, dan dunia usaha untuk memadukan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
- b. Membuka peluang bagi penduduk miskin di desa tertinggal untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan cara menciptakan dan memperluas lapangan kerja produksi melalui peningkatan berbagai kegiatan pembangunan di desa-desa tertinggal.
- c. Mengembangkan, meningkatkan dan memantapkan kehidupan ekonomi penduduk miskin melalui penyediaan dana bantuan khusus.

³ Instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 1993, tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan, halaman 1.

- d. Meningkatkan kesadaran, kemauan, tanggungjawab, rasa kebersamaan, harga diri dan percaya diri masyarakat".⁴

Dari gambaran tersebut di atas, maka pemerintah bertekad untuk mengentaskan kemiskinan pada penduduk miskin yaitu berupa Inpres Desa Tertinggal (IDT). Hakekat dari program ini adalah pemanfaatan sumber daya dan penumbuhan iklim yang mendorong timbulnya prakarsa dan swadaya masyarakat untuk membangun dirinya.

Program Inpres Desa Tertinggal merupakan salah satu bentuk dari sekian banyak program-program pembangunan di daerah pedesaan. Pembangunan desa akan langsung menyentuh sebagian terbesar rakyat Indonesia. Karena sebagian besar rakyat Indonesia berada di daerah pedesaan. Maka pengetahuan masyarakat desa sangat penting artinya untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan desa. Masalah yang sering dialami dan dihadapi dalam program pembangunan desa adalah latar belakang dan keterbatasannya dalam segala hal. Usaha untuk memaksimalkan fungsi aparat terkait dalam suatu program pembangunan desa serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat desa banyak terbentur dalam masalah tersebut. Keterampilan para pembina program di desa dan strata pendidikan masyarakat desa yang dibina sangat minim. Menyebabkan kurang efektifnya suatu program pembangunan desa sehingga kurangnya pemahaman masyarakat desa tentang arti, makna

⁴ Lampiran Inpres RI No. 5 Tahun 1993, tanggal 27 Desember 1993, tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan, halaman 3.



dan tujuan daripada program pembangunan desa tersebut. Demikian juga aspirasi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam suatu program tidak dapat disadarkan karena ketidaktahuan mereka memanfaatkan dan menyalurkan dalam suatu wadah atau lembaga partisipasi masyarakat desa. Satu pihak, para pembina atau aparat di daerah pedesaan belum memiliki tingkat keterampilan dan kecakapan yang cukup tinggi dan dapat diharapkan untuk menggali, memotivasi, mengarahkan, membina dan memberdayakan segala potensi desa yang ada. Keseimbangan yang serasi antara fungsi pembina atau aparat di daerah pedesaan dan partisipasi aktif dari masyarakat desa dalam pelaksanaan program pembangunan di daerah pedesaan, merupakan ikatan yang paling menunjang dalam menentukan keberhasilan program pembangunan desa. Dalam pelaksanaan program Inpres Desa Tertinggal misalnya, banyak uraian kegiatan atau unit usaha yang dibiayai dengan dana program, dalam berbagai pandangan dan pertimbangan tidak potensial untuk menghasilkan dan mendayagunakan potensi yang ada karena kekurangpahaman masyarakat desa untuk secara mandiri melakukan perencanaan kegiatan sendiri. Secara teoritis bahwa perencanaan kegiatan adalah oleh masyarakat desa sendiri, tetapi bukan berarti menutup kesempatan kepada aparat atau pembina di desa untuk melakukan pembinaan dan kegiatan yang bersifat inovasi agar masyarakat desa menghasilkan perencanaan kegiatan yang lebih baik dan lebih berdaya guna. Dalam pelaksanaan juga banyak dijumpai sikap dan tindakan dari anggota

masyarakat yang mencerminkan ketidaktahuan mereka secara penuh tentang sifat dari program Inpres Desa Tertinggal.

Program Inpres Desa Tertinggal adalah upaya pemerintah untuk mempercepat terangkatnya warga masyarakat miskin dibawah garis kemiskinan. Upaya khusus membantu dan menanggulangi kemiskinan dari penduduk miskin pada dasarnya merupakan upaya mengarahkan program pembangunan secara intensif ke desa-desa sebagai kantong kemiskinan. Adapun desa yang dikategorikan tertinggal dan memenuhi syarat untuk dapat menerima bantuan dana IDT adalah jalanan yang tidak beraspal, pekerja yang tidak menentu misalnya sehari bekerja sehari tidak, buruh tani atau petani yang tanahnya tidak lebih dari seperempat hektar serta income perkapitanya kurang dari Rp. 13.295 perbulan. Sehingga kondisi dimana pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan.

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik Bappenas Depdagri, menyebutkan bahwa 65.424 desa yang ada di Indonesia, 28.223 atau 43,14% desa tersebut tergolong desa tertinggal dimana kesemua desa tersebut dilibatkan dalam program Inpres Desa Tertinggal. Dari 28.223 atau 43,14% desa tertinggal tersebut, 909 atau 3,22% desa tertinggal berada di Sulawesi Selatan dan 8 atau 0,9% diantaranya berada di Kabupaten Soppeng. Karena program IDT hanya dilaksanakan tiga tahun anggaran saja yaitu tahun anggaran

1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, maka hanya Desa Sering dari 8 atau 0,9% desa tertinggal yang ada di Kabupaten Soppeng Telah menerima dana IDT selama tiga tahun dari pemerintah. Adapun dana yang diberikan kepada setiap desa tertinggal sebanyak Rp. 20 juta setahun, sehingga tidak kurang dari Rp. 564,46 milyar dana IDT yang beredar dalam setahun di seluruh Indonesia.

Program Inpres Desa Tertinggal yang merupakan landasan dinamika kehidupan masyarakat dimana pengembangan-pengembangan selanjutnya tergantung pada masyarakat itu sendiri, dengan maksud untuk menumbuhkan dan memperkuat kemampuan masyarakat miskin meningkatkan taraf hidupnya dengan membuka keterisolasian dan pengembangan kesempatan berusaha. Karena program IDT ini dilaksanakan tiga tahun anggaran saja yang pelaksanaannya dimulai pada bulan April 1994 sudah berakhir, dan selama tiga tahun anggaran tersebut kita sudah dapat melihat hasil dari pelaksanaan program IDT ini. Dan berdasarkan fenomena inilah penulis ingin melihat sampai sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan program IDT di Desa Sering Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng.

1.2 Masalah dan Batasan Masalah

Kemiskinan merupakan masalah sosial dan pembangunan yang bersifat kompleks. Situasi serba kekurangan yang terjadi bukan dikehendaki oleh miskin, melainkan karena adanya keterbatasan hidup yang sulit untuk dihindari. Desa Sering sebagai salah satu desa di Kabupaten Soppeng yang telah

tiga tahun berturut-turut telah menerima dana IDT sudah begitu banyak mengalami perubahan, sehingga ingin diketahui sampai sejauh mana hasil yang telah dicapai dengan adanya program IDT tersebut.

Bertitik tolak dari uraian-uraian terdahulu, maka program IDT adalah merupakan satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di desa-desa tertinggal dengan harapan bahwa program ini dapat mengangkat masyarakat dari penderitaan hidupnya kekehidupan yang lebih baik. Karena masalah kemiskinan bukan hal yang baru, ia ada di mana-mana, dan usaha untuk menanggulangnya juga telah banyak dilakukan dengan program-program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, hanya saja program Inpres Desa Tertinggal merupakan program yang sifatnya relatif baru bagi masyarakat miskin. Dari sinilah penulis ingin melihat realisasi dari pelaksanaan program Inpres Desa Tertinggal di Desa Sering Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng. Apakah dengan adanya program IDT ini mampu mengadakan perubahan-perubahan didalam masyarakat desa miskin menjadi masyarakat yang lebih baik. Melalui program ini pula akan dipecahkan program sektoral dan regional sehingga berdampak besar dalam upaya-upaya penanggulangan kemiskinan penduduk terutama di Desa Sering Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng.

Agar penelitian dan penulisan tentang dampak pelaksanaan IDT di Desa Sering dapat dipaparkan secara terperinci, maka penulis perlu

merumuskan permasalahan-permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut dalam Bab-Bab berikutnya.

Adapun rumusan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program Inpres Desa Tertinggal di Desa Sering Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng.
2. Kendala apa saja yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Inpres Desa Tertinggal di Desa Sering Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng.
3. Apa dampak yang ditimbulkan pada pelaksanaan IDT terhadap masyarakat Desa Sering Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng.

Bertolak dari 3 uraian permasalahan di atas dengan menjadikan tahun 1994 sebagai titik awal penelitian dengan alasan bahwa pada tahun inilah awal dilaksanakannya IDT dan menjadikan tahun 1997 sebagai akhir penelitian, mengingat tahun ini adalah akhir dari pelaksanaan IDT di Indonesia umumnya, dan di Desa Sering khususnya.

1.3 Metodologi

Kehidupan modern menuntut alat-alat intelektual yang dapat memahami lingkungan secara mendalam dan penuh arti, sehingga tidak terikat atau terpaku pada rasa keinginan belaka, dan mampu mengemansipasikan diri dari gejolak musim-musiman, lebih-lebih dari tekanan kekuatan sosial, dan seperti apa yang telah diucapkan Langlois dan Seignobos, yakni :

"Sejarah mempunyai pengaruh higienis terhadap jiwa kita karena membebaskannya dari sifat percaya belaka".⁵

Dalam penyusunan historiografi Indonesia generasi sejarawan dewasa ini menghadapi perubahan sosial baik yang evolusioner maupun yang revolusioner. Perubahan-perubahan yang bergerak dengan langkah yang semakin cepat membuka pandangan pandangan baru bagi sejarawan, pada satu pihak, kesadaran akan historisitas benda-benda mengutarakan soal kapan, dimana, serta apa yang akan terjadi. Dengan demikian tuntutan akan kualitas sejarah semakin meningkat seiring dengan lajunya informasi. Untuk itu dalam penulisan sejarah hendaknya tidak semata-mata menceritakan kejadian tetapi bermaksud untuk menerangkan kejadian itu dengan mengkaji sebab-sebabnya, kondisi lingkungannya dan konteks sosial kulturalnya.

Dalam rangka mencapai hal tersebut, maka penggunaan dan pemahaman metode dan metodologi sejarah sangat penting. Tujuannya agar usaha untuk merekonstruksi masa lampau realitas lokal ataupun nasional yang terarah pada penelitian dan penulisan sejarah yang kritis. Kesemuanya itu perlu diketahui, dimengerti dan dipahami pada masa kini, sehingga kita dapat merencanakan langkah pada masa depan atau paling tidak dapat memberikan gambaran tentang realitas masa lampau dalam menghadap realitas masa kini

⁵ Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1992 halaman 21.

dan masa datang. Olehnya itu, sejarah sangat penting dalam menyukseskan pembangunan bangsa menuju cita-cita nasional.

Dalam melakukan analisis, pengkaji memerlukan alat-alat yang dibutuhkan untuk memudahkan analisis itu. Lagi pula alat-alat analisis itu harus memenuhi syarat-syarat sehingga dapat berfungsi secara operasional, jadi relevan dan cocok dengan objek yang dianalisis itu.

Dalam studi ini akan digunakan pendekatan sosial ekonomi untuk menyoroti aspek-aspek sosial dan ekonomi masyarakat Desa Sering sehubungan dengan pelaksanaan IDT di Kabupaten Soppeng umumnya dan Desa Sering khususnya.

Memperhatikan fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan IDT di Desa Sering yang mana dalam pelaksanaannya ternyata telah menimbulkan berbagai perubahan dalam masyarakat Desa Sering. Dengan demikian, kesempatan yang diberikan oleh pemerintah dengan memberikan dana IDT mendapat sambutan dari masyarakat Desa Sering khususnya.

Adanya upaya peningkatan taraf hidup masyarakat di daerah ini mengakibatkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat seperti perubahan struktur sosial, perkembangan pola pikir masyarakat dan sebagainya.

Dalam usaha mengungkapkan dan merekonstruksi obyek permasalahan ini maka diperlukan cara kerja yang mantap agar dapat meringankan beban

dan mengurangi kesulitan-kesulitan yang dihadapi penulis. Cara kerja yang dimaksud adalah metode sejarah, yang meliputi : pencarian sumber (heuristik), kritik sumber, interpretasi dan penulisan sejarah (historiografi). Hal ini dilakukan dengan mengingat bahwa sejarah sebagai ilmu dituntut obyektifitas.⁶ Ilmu tanpa obyektifitas tidak mempunyai nilai ilmiah dan akan berhenti sebagai ilmu. Namun disadari sepenuhnya bahwa subyektivitas⁷ tak mungkin dapat diharapkan.

Dalam usaha penulis untuk mendapatkan informasi dan data dari lapangan penelitian, maka dalam penelitian nanti, penulis akan mempergunakan teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Langkah awal dari kegiatan ini adalah mencari sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan oleh penulis adalah arsip-arsip yang berhubungan dengan pembahasan. Adapun sumber-sumber sekunder berupa buku-buku dan makalah yang dapat mendukung dalam penulisan karya ini.
2. Observasi, yaitu penulis akan melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan desa miskin sebagai penerima dana IDT atau kelompok masyarakat

⁶ Obyektifitas adalah usaha mendekati diri pada objek atau dengan kata lain bertanggung jawab pada kebenaran objek. Hugiono dan P.K. Poerwantana, Pengantar Ilmu Sejarah, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992) halaman 26.

⁷ Subyektivitas adalah kesaksian atau tafsiran merupakan gambaran yang dihasilkan oleh perasaan atau pikiran manusia. Ibid.

(pokmas) dengan instrumen yang digunakan adalah daftar pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Wawancara, yaitu penulis akan mengadakan tanya jawab terhadap responden untuk memperoleh data mengenai sikap dan pendapat serta pengalaman responden.
4. Kuisisioner, yaitu penulis akan memberikan daftar pertanyaan kepada sejumlah kepala keluarga sebagai sampel dalam penelitian.

Selanjutnya sumber yang telah terkumpul akan diseleksi dan dianalisa dengan tujuan untuk mendapatkan sumber-sumber yang kredibilitasnya dapat dipercaya. Kemudian langkah selanjutnya adalah merumuskan pertanyaan dari sumber-sumber yang telah lulus seleksi kritik sumber. Tafsiran (interpretasi) dan ulasan penulis akan mewarnai pernyataan yang dibuat. Tafsiran sedapat mungkin mendekati keobyektifan dalam penulisan.

Sebagai langkah yang terakhir adalah menyajikan data-data dan fakta-fakta yang diyakini kebenarannya ke dalam suatu tulisan yang menarik.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA SERING

Bila kita mendengar kata desa biasanya tergambar suatu perkampungan atau pedalaman yang jauh dari kota dengan hamparan ladang dan sawah serta kehidupan yang serba tradisional.

Desa diartikan sebagai suatu persekutuan hidup bersama yang mempunyai persatuan hukum, organisasi, serta batas geografis tertentu. Suatu persekutuan hidup yang setingkat dengan desa di tiap daerah yang berbedabeda, misalnya di Sumatera Selatan disebut dusun, di Maluku disebut dati, dibatak disebut huta/uta, di Aceh dikenal dengan istilah gampung dan meunasah, di Minangkabau disebut nagari atau luha, di Minahasa disebut Wanua, di Kalimantan disebut udik, di Bugis dikenal matowa sedangkan di Makassar disebut gaukang.

Setelah keluarnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, disusul kemudian Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa maka istilah-istilah tersebut diseragamkan menjadi desa untuk setiap daerah di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 yang dimaksud adalah :

"suatu kesatuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah

langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia".⁸

Pengertian desa identik dengan kelurahan. Secara struktural keduanya mempunyai kedudukan yang sama, tetapi kelurahan tidak berhak menjalankan rumah tangga sendiri. Lurah dan perangkatnya di kelurahan merupakan pegawai pemerintah daerah (pemda). Keseluruhan merupakan daerah hukum setingkat desa yang berada diperkotaan (urban).

Desa Sering yang berada di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng mempunyai luas 624 km², dan terdiri dari 2 dusun dengan luas masing-masing:

- Dusun Wanuatua dengan luas 31,6 km², dengan 3 RW dan 7 RT.
- Dusun Jilengnge dengan luas 30,8 km², dengan 3 RW dan 6 R

Desa ini terletak di sebelah utara ibukota Kabupaten Soppeng dan sebelah barat ibukota kecamatan Donri-Donri, secara lengkapnya batas-batas Desa Sering adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Marioriawa.
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Donri-Donri.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pesse.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barru.

Orbitas desa merupakan penilaian letak desa dengan pusat-pusat fasilitas (ibukota propinsi, kabupaten/kotamadya dan kecamatan). Adapun penilaiannya adalah sebagai berikut :

⁸ Ir. Kusnaedi, Membangun Desa (Pedoman Untuk Penggerak Program IDT, Mahasiswa KKN, dan Kader Pembangunan Desa), Penebar Swadaya, Jakarta 1995, halaman 3.

1. Apabila jarak desa dari propinsi kurang dari 60 km, dengan jalan penghubung lancar, sehingga orang-orang desa dengan mudah mencapainya (sehari dapat pergi pulang) maka orbitas desa adalah orbitas primair.
2. Apabila jarak desa dari ibukota kabupaten/kotamadya kurang dari 30 km, dengan jalan penghubung lancar, sehingga orang desa dengan mudah mencapainya ($\frac{1}{2}$ hari dapat pergi pulang) maka orbitas sekundair.
3. Apabila jarak desa dari ibukota kecamatan kurang dari 15 km dengan jalan penghubung lancar sehingga orang-orang desa mudah mencapainya maka orbitas desa adalah tertiar.
4. Apabila jarak desa dari ibukota propinsi, kabupaten dan kecamatan melebihi angka tersebut di atas, atau jarak terpenuhi tetapi penghubung tidak lancar hanya ada jalan tanah, maka desa dalam keadaan terisolir.
5. Apabila desa dekat ibukota propinsi, kabupaten dan kecamatan, maka penilaian orbitas dipilih pada jalan perhubungan yang paling lancar dan apabila jalan penghubungnya sama maka dipilih ibukota yang paling besar.

Berdasarkan cara penelitian yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa Desa Sering mempunyai orbitas sebagai berikut :

- Ibukota propinsi \pm 187 km.
- Ibukota kabupaten \pm 14 km.
- Ibukota kecamatan \pm 1 km.

Dengan perhubungan yang lancar dan jarak kurang dari 30 km dari ibukota kabupaten dan dapat pergi pulang $\frac{1}{2}$ hari, maka orbitan Desa Sering dikategorikan orbitan secundair.

Adapun sarana perhubungan yang paling dominan di Desa Sering adalah kuda, yaitu sebanyak 60 ekor atau 84,5%, mobil 2 buah atau 2,8%, dan motor 9 buah atau 12,7%. Tetapi walaupun jumlah mobil di daerah ini agak kurang namun jika hari pasar mobil luar desa hilir mudik mencari penumpang yang ingin ke pasar. Untuk jelasnya ada pada tabel di bawah ini.

Tabel 1

Distribusi Jumlah Sarana Perhubungan di Setiap Dusun di Desa Sering

| No. | Sarana Perhubungan | Dusun | | Jumlah | Prosentase |
|-----|--------------------|-------|----|--------|------------|
| | | JN | WT | | |
| 1. | Mobil | - | 2 | 2 | 2,8 |
| 2. | Motor | 5 | 4 | 9 | 12,8 |
| 3. | Kuda | 37 | 23 | 60 | 84,4 |
| | Jumlah | 42 | 29 | 71 | 100 % |

Su.mber : Kantor Desa Sering

Keterangan :

JN = Dusun Jilengnge

WT = Dusun Wanuatua

Desa Sering dilihat dari pemanfaatan wilayah ditandai dengan ciri penggunaan tanah, dan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Luas Desa Menurut Penggunaannya (Ha)

| No. | Jenis Penggunaan Tanah | Luas (Ha) | Prosentase |
|-----|--------------------------|-----------|------------|
| 1. | Perumahan dan Pekarangan | 71,3 | 11,4 |
| 2. | Persawahan | 84 | 13,5 |
| 3. | Perkebunan | 80,2 | 12,8 |
| 4. | Hutan | 286,3 | 45,9 |
| 5. | Pekuburan | 5,7 | 0,9 |
| 6. | Lain-lain | 96,5 | 15,5 |
| | Jumlah | 624 Ha | 100 % |

Sumber : Kantor Desa Sering

Dari Tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar tanah di Desa Sering belum diolah atau masih berupa hutan seluas 286,3 Ha atau 45,9% dari luas keseluruhan tanah yang ada di Desa sering. Areal persawahan 84 Ha atau 13,5% menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Sering bergerak pada bidang pertanian, namun sawah penduduk Desa Sering pada umumnya sawah tadah hujan karena di desa ini belum ada irigasi. Sedangkan areal perkebunan seluas 80,2 Ha atau 12,8% pada umumnya ditanami pohon coklat, murbei dan kelapa. Dan jika musim kemarau sawah-sawah mereka ditanami tanaman palawija, seperti jagung, kacang ijo, kacang tanah dan sebagainya.

Tabel 3
Potensi Sumber Air di tiap Dusun Desa Sering

| No. | Nama Dusun | Jumlah | | | |
|-----|------------|--------|------------|--------------|------|
| | | Sungai | Sumur Umum | Sumsur Rumah | PDAM |
| 1. | Wanuatua | 1 | 3 | 13 | - |
| 2. | Jilengnge | 1 | 2 | 18 | - |
| | Jumlah | 2 | 5 | 32 | |

Sumber : Kantor Desa Sering

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa sungai yang mengalir Desa Sering hanya satu yaitu yang melewati 2 dusun. Sumur umum sebanyak 5 buah, dimana sumur umum ini didatangi oleh para penduduk terdekat baik untuk mencuci dan mandi maupun untuk mengambil air minum. Sedangkan yang merasa terlalu repot mengambil air di sumur umum atau karena rumahnya agak jauh, maka mereka membuat sumur sendiri.

2.1 Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa sering

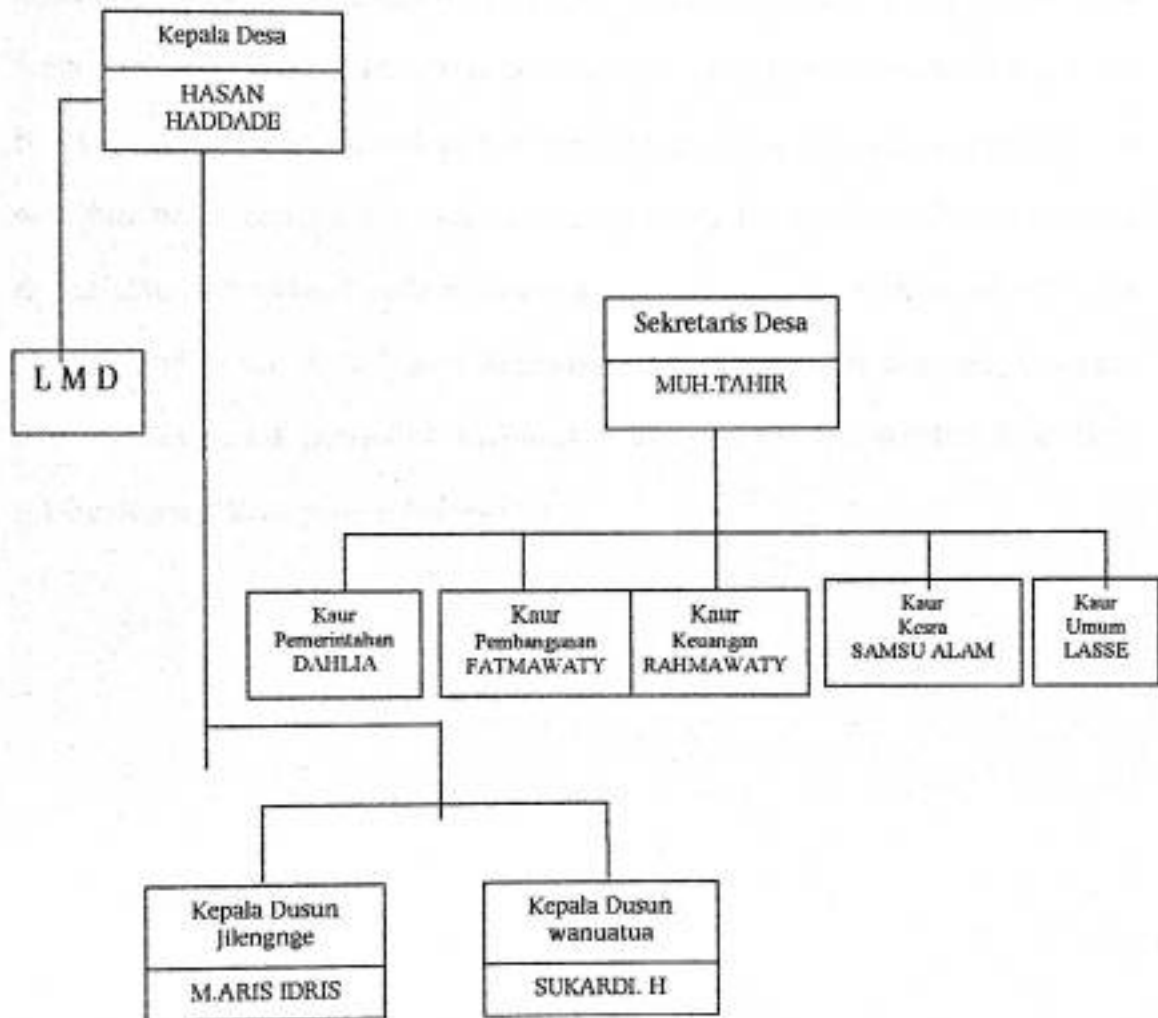
Struktur organisasi pemerintahan Desa sering di susun berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, dimana pemimpin pemerintahan adalah kepala desa. Sebagai kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan dibantu oleh lembaga musyawarah desa (LMD). Anggota terdiri dari pemuka

masyarakat dan kepala dusun yang diketuai oleh kepala desa, sedangkan sekretarisnya dijabat oleh sekretaris desa.

Untuk melaksanakan administrasi pemerintahan desa, kepala desa dibantu oleh staf sekretaris desa membawahi 5 kepala urusan yaitu kepala urusan pemerintahan, kepala urusan keuangan, kepala urusan kesra, kepala urusan umum. Berikut ini struktur pemerintahan Desa Sering.



**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA SERING KECAMATAN
DONRI-DONRI KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 1994-1995**



Sumber: Kantor Desa Sering

Mata Pencaharian

Sebagaimana telah disebutkan bahwa luas Desa Sering adalah 62.4 km² yang dihuni 1.919 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia layak untuk dikembangkan. Penduduk di Desa Sering sebagian besar adalah petani, ini disebabkan karena tanahnya yang begitu luas untuk diolah sedangkan ibu rumahtangga dan remaja putri adalah sebagian besar pengrajin sutra, karena memang Desa Sering khususnya dan Kecamatan Donri-Donri pada umumnya merupakan salah satu penghasil sutra yang cukup besar di Sulawesi Selatan dan terbesar di Kabupaten Soppeng. Adapun komposisi penduduk menurut mata pencaharian penduduk di Desa Sering dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4

Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

| No. | Jenis Mata Pencaharian | Jumlah | Prosentase |
|-----|------------------------|--------|------------|
| 1 | Petani | 425 | 28,63 |
| 2 | Buruh | 2 | 0,23 |
| 3 | Sopir | 1 | 0,114 |
| 4 | Guru | 4 | 0,46 |
| 5 | Pengusaha | 2 | 0,23 |
| 6 | Pegawai/ABRI | 1 | 0,114 |
| 7 | Pengrajin Sutra | 417 | 47,71 |
| 8 | Bidan | 1 | 0,114 |
| 9 | Dukun Bayi | 3 | 0,34 |
| 10 | Tukang Kayu | 12 | 1,37 |
| 11 | Tukang Batu | 5 | 0,57 |
| 12 | Tukang Jahit | 1 | 0,114 |
| | Jumlah | 874 | 100 % |

Sumber : Kantor Desa Sering

Data Survei Penduduk Oktober 1995

Dari tabel di atas kita dapat mengetahui bahwa jumlah penduduk yang terlibat dalam lapangan pekerjaan sebanyak 874 jiwa. Dari kelompok penduduk yang tergolong unsur produktif yaitu 1. 246 jiwa. Ini berarti bahwa 70,14%

penduduk Desa Sering tergolong produktif dan terlibat dalam lapangan pekerjaan. Sedangkan 372 jiwa atau 29,86% tergolong usia produktif tetapi tidak terlibat dalam lapangan pekerjaan (menganggur). Pada tabel di atas dapat juga dilihat sektor yang paling menonjol yaitu sektor pertanian dan pengrajin sutra. Dari 874 jiwa penduduk produktif, 425 orang atau 48,62% sebagai petani dan sebagian pengrajin sutra 417 orang atau 47,71%.

Pendidikan

Tentang keadaan tingkat pendidikan di Desa Sering dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5
Keadaan Tingkat Pendidikan

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Prosentase |
|-----|---------------------------|--------|------------|
| 1. | Usia belum sekolah | 122 | 6,36 |
| 2. | Tidak tamat SD/ sederajat | 364 | 18,97 |
| 3. | Tamat Sd/ sederajat | 569 | 29,65 |
| 4. | Tamat SLTP/ sederajat | 94 | 4,90 |
| 5. | Tamat SMU/ sederajat | 68 | 3,54 |
| 6. | Tamat Akademi/ sederajat | 3 | 0,16 |
| 7. | Tamat Perguruan Tinggi | 2 | 0,10 |
| 8. | Tidak pernah sekolah | 697 | 36,32 |
| | Jumlah | 1.919 | 100 % |

Sumber : Kantor Desa Sering
Data Survei Penduduk Oktober 1995

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Desa Sering masih minim dimana terdapat 697 orang atau 36,32% dari 1.919

penduduk tidak pernah sekolah atau buta aksara. Sedangkan tidak tamat SD sebanyak 364 orang atau 18,97% dan tamat SD/ sederajat sebanyak 569 orang atau 29,65%. Karena rendahnya tingkat pendidikan di Desa Sering adalah salah satu penyebab desa ini ditunjuk pemerintah daerah tingkat II Soppeng sebagai desa tertinggal.

2.2 Peranan Masyarakat Desa Sering dalam Pembangunan Desa

Pembangunan desa pada hakikatnya adalah usaha pembangunan yang mencakup segala aspek kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan nasional serta mewujudkan kehidupan yang lebih baik guna meningkatkan taraf hidup sosial ekonomi masyarakat. Tujuan ini dapat dicapai jika upaya pembangunan mendapat dukungan yang luas atau partisipasi masyarakat. Ini berarti bahwa upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat perlu mendapat prioritas dalam penanganannya.

"Pembangunan desa dan masyarakat pedesaan terus didorong melalui peningkatan pembangunan sektoral, pengembangan kemampuan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam dan penumbuhan iklim yang mendorong tumbuhnya perkembangan masa swadaya menuju desa swasembada".⁹

Berbicara tentang peran masyarakat berarti mempersoalkan tentang tingkat pengetahuan dan persepsi masyarakat tentang suatu program pembangunan. Peran dari masyarakat sebagai subyek sekaligus obyek program hanya dapat dipupuk bila terdapat tingkat pengetahuan dan persepsi yang cukup memadai dan positif dari masyarakat terhadap program pembangunan tersebut.

⁹ TAP MPR RI No. II/MPR/1993, Garis-Garis Besar Haluan Negara, halaman 269.

Maka dalam program pembangunan desa tertinggal yang diistilahkan sebagai program Inpres Desa Tertinggal, prinsip-prinsip pembangunan desa yang perlu diperhatikan adalah keseimbangan hubungan yang serasi antara fungsi aparat pemerintah yang terkait dengan dukungan partisipasi secara luas dari masyarakat.

Rencana pembangunan pedesaan dalam berbagai macam bentuk dan kegiatan yang konkret dituangkan pemerintah dalam bentuk program-program daya kerja dan efektifitas suatu program pembangunan merupakan rangkaian sistematis yang saling mengkait. David Korten mengemukakannya dengan menggunakan variabel program, organisasi, dan penerima bantuan.

"Daya kerja dari suatu program pembangunan adalah fungsi kesesuaian antara mereka yang dibantu, program dan organisasi atau yang membantu. Program pembangunan akan gagal jika tidak ada hubungan yang erat antara : kebutuhan-kebutuhan pihak penerima bantuan dengan hasil program; persyaratan program dengan kemampuan nyata dari organisasi pembantu; kemampuan pengungkapan kebutuhan oleh pihak penerima dan proses pengambilan keputusan dari organisasi pembantu"¹⁰

Dalam konsep pembangunan desa sebagai konkritnya, maka program-program pembangunan yang dilancarkan perlu memperhitungkan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat desa sebagai mereka yang dibantu dan kemampuan pembina atau aparat di dsacrah pedesaan sebagai organisasi pembantu. Schingga dicapai keseimbangan antara kebijaksanaan pemerintah (program), partisipasi masyarakat desa dan kemampuan aparat di pedesaan.

¹⁰ David Korten dan Syahrir, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1983, halaman 232.



Pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di wilayah pemerintahan yang terendah yaitu desa. Ciri utama pembangunan desa yang terpenting adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di desa. Baik dalam melaksanakan secara langsung dalam bentuk swadaya murni ataupun swadaya gotong-royong. Partisipasi merupakan konsep yang mencerminkan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan timbulnya gagasan baru dalam masyarakat mengenai kehidupan mereka. Setiap program pembangunan desa dimaksudkan untuk membantu dan memacu masyarakat desa membangun pelbagai sarana dan prasarana desa yang diperlukan. Keikutsertaan pedesaan amat diperlukan bagi berhasilnya pembangunan di pedesaan.

Pada pokoknya peran dalam pembangunan lebih dapat terselenggara dalam masyarakat, apabila rakyat merasa berpartisipasi dalam formulasi arah dan cara pembangunan, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan terdapatnya keseimbangan mengenai pemetikan hasil pembangunan.

Pentingnya peran masyarakat pedesaan dalam pembangunan lebih penting bila diingat bahwa sifat pembangunan desa yang berdaya guna adalah pembangunan dari dalam. Yaitu pembangunan dari mereka, oleh karena dan untuk mereka sendiri. Sebagaimana ditekankan oleh H. Sumitro Maskun dalam strategi pembangunan desa sebagai berikut :

- Mengefektifkan kebijaksanaan dan program-program pembangunan desa dengan cara menumbuhkan dan mengefektifkan peran serta (partisipasi) masyarakat sebagai kunci daya gerak masyarakat dalam setiap pembangunan desa.

- Strategi pembangunan masyarakat desa adalah membantu masyarakat untuk dapat membangun dan berkembang atas kemampuan sendiri.
- Pembangunan masyarakat desa selalu mengusahan agar dapat memecahkan permasalahan pembangunan pedesaan, dengan langkah pertama adalah mengusahan dapat tersalurnya aspirasi masyarakat desa, sehingga dapat menumbuhkan gairah dan kepercayaan serta semangat membangun dikalangan masyarakat .
- Untuk mencapai hasil optimum, dari usaha-usaha pembangunan desa yang diusahakan oleh sektor-sektor, maka program pembangunan desa harus benar-benar dapat mengetahui dan memprogramkan secara tepat kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat.
- Setiap program pemerintah lebih diharapkan untuk dapat dicapainya dampak yang berkepanjangan dari suatu segi pembangunan.
- Proses pelaksanaan politik pembangunan desa, lebih banyak dilakukan secara desentralisasi dan proses dekonsentrasi semakin dikurangi. Dalam hal ini daerah akan lebih berperan dalam mewujudkan keberhasilan dan pembanguna desa lebih dilaksanakan secara ekonomi.
- Program akan lebih banyak berupa program-program yang secara langsung menyentuh hajat hidup dan kepentingan masyarakat.
- Program pemangunan desa akan lebih berorientasi kepada pembangunan manusia sebagai unsur masyarakat.
- Pembangunan desa akan dilakukan secara demokratis, mengutamakan peningkatan kehidupan ekonomi rakyat, berdasarkan peningkatan yang berlandaskan agama.
- Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan politik pemerintah dalam pembangunan nasional dan regional. Partisipasi masyarakat dapat digerakkan dengan mengusahkan 'understanding' masyarakat atas kebijaksanaan pemerintah dan terciptanya kondisi aparatur pemerintah sebagai 'solidarity makers'.
- Menciptakan kemampuan masyarakat untuk menetralsir kondisi birokratis administrasi pemerintah sehingga kebudayaan masyarakat tidak terkena sistem formal".¹¹

Pada tingkat desa dan kelurahan sesuai keputusan Presiden Republik Indonesia No. 28 tahun 1980 diputuskan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). LKMD merupakan lembaga masyarakat yang tumbuh dari, oleh

¹¹ TAP MPR No. II MPR/1993, Garis-Garis Besar Haluan Negara, halaman 57.

dan untuk masyarakat dan merupakan wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan. LKMD inilah yang memadukan pelaksanaan pelbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa swadaya gotong-royong dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat desa. LKMD sebagai wahana perwujudan aspirasi dan partisipasi rakyat harus mampu secara dinamis menggerakkan dan memanfaatkan segala potensi yang ada di desa. LKMD sebagai penyempurnaan dari Lembaga Sosial Desa (LSD) berdasarkan Keputusan Presiden No. 28 tahun 1980 pasal 6 mempunyai fungsi antara lain :

1. Menanamkan pengertian dan kesadaran Penghayatan dan Pengalaman Pancasila;
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
3. Membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan;
4. Meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera;
5. Membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu pemerintah desa kelurahan untuk menciptakan ketahanan yang mantap.

Kalau LKMD dengan fungsi yang demikian luas mendapat bimbingan tepat serta dinamis, maka lembaga itu dapat mengadakan inovasi dalam kehidupan masyarakat pedesaan sesuai dengan inovasi dalam kehidupan masyarakat pedesaan sesuai dengan derap pembangunan dan dapat meningkatkan peranannya dalam usaha membina ketahanan desa.

Dalam mewujudkan peran masyarakat itu perlu adanya penumbuhan dan pengembangan rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat kepada suatu program pembangunan biasanya dipengaruhi oleh tingkat persepsi atau pengetahuan dan pemahamannya tentang program pembangunan tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh H. Sumitro Maskun berikut ini :

"Peran masyarakat atas kebijaksanaan pemerintah ditentukan secara bertingkat-tingkat oleh :

- a. Terdapatnya pemahaman timbal balik antara perangkat pemerintah di tingkat birokrasi pemerintah daerah dengan masyarakat yang bersangkutan.
- b. Terdapatnya sikap solidaritas yang tinggi dari masyarakat atas goodwill pemerintah dan political will pemerintah.
- c. Tertampungnya kepentingan-kepentingan masyarakat oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah.
- d. Terdapatnya usaha-usaha motivasi dan stimulasi yang dapat mendorong kreativitas penduduk".¹²

Usaha dan kegiatan peran masyarakat yang tumbuh dari bawah dalam bentuk inisiatif dan kreasi yang lahir secara spontan dari rasa kesadaran dan tanggung jawab, harus dapat terpelihara dan dikembangkan. Untuk itu dalam pelaksanaan program pembangunan di desa diperlukan bimbingan, pengarahan, pembinaan oleh aparat di desa. Pada tingkat desa, Pelaksanaan serta pelayanan pembangunan lebih banyak memanfaatkan tenaga yang berasal dari desa dengan mendapatkan bimbingan dari masing-masing aparat serta petugas lapangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing dalam koordinasi kepala desa.

¹² H.Sumitro Maskun, *Pembangunan Masyarakat Desa; Asas Kebijaksanaan dan Manajemen*. Mw Mandala, Yogyakarta, 1993, halaman 72.

BAB III

KEMISKINAN DAN PENANGGULANGANNYA

3.1 Pengertian Kemiskinan

Berbicara tentang pengertian kemiskinan bukanlah hal mudah, hal ini disebabkan karena masalah kemiskinan merupakan persoalan yang multidimensional yang tidak saja melibatkan faktor ekonomi tetapi juga sosial, budaya dan politik, dalam hal ini tergantung dari sudut mana kita melihat. Berdasarkan dimensi ini dapat dianalisa sifat-sifat kemiskinan, dengan demikian dapat dibedakan atas aspek-aspek kemiskinan dan menguak sebab-sebab kemiskinan, atas dasar tersebut kemudian dirancang upaya untuk menanggulangi kemiskinan.

Kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Kemiskinan antara lain ditandai oleh sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan yang seakan-akan tidak dapat diubah, yang tercermin didalam lemahnya kemauan untuk maju, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya nilai tukar hasil produksi, rendahnya produktivitas, terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pendapatan dan terbatasnya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.

Secara ekonomis kemiskinan menggambarkan keadaan kekurangan sumber daya yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan

sekelompok orang. Sumber daya yang dimaksud dalam pengertian finansial tetapi perlu mempertimbangkan semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Ali Hasyani bahwa :

"Seorang dikatakan atau dikategorikan miskin jika ia tidak memiliki pendapatan yang memadai untuk mendukung kehidupannya secara layak".¹³

Bila pendapatan seseorang atau keluarga tidak memenuhi kebutuhan minimum, maka orang atau keluarga tersebut dikatakan miskin, yang ditentukan dengan garis kemiskinan. Selanjutnya dijelaskan pengertian garis kemiskinan yaitu :

"Pembatasan antara kemiskinan dan tidak miskin yang ditentukan dengan tingkat pendapatan minimum seperti pangan, sandang papan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Dengan demikian bila tingkat pendapatan seseorang tidak mencapai kebutuhan dasarnya maka orang itu dikatakan miskin".¹⁴

Masalah kemiskinan merupakan hal yang kompleks, dapat merupakan akibat sekaligus sebagai penyebab antara faktor yang saling mempengaruhi, jadi kemiskinan merupakan suatu lingkaran yang tak berujung pangkal.

Sandra Wallman mengemukakan pengertian kemiskinan sebagai berikut:

"Bahwa kemiskinan itu sebagai akibat terbatasnya sumber daya ekonomi dalam usaha memahami kebutuhan masyarakat sumber daya ekonomi seperti modal, tanah, manusia dan sumber daya non ekonomi, seperti pendidikan, keterampilan dan keahlian".¹⁵

¹³ M. Munandar Soelaeman MS. Ilmu Sosial dasar, Bandung, 1992, halaman 174.

¹⁴ S. Ali M. Saleh. Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program IDT, Seminar Regional Sehari, 1993, halaman 3.

¹⁵ Ibid, halaman 4.

Kemiskinan dalam pengertian ini umumnya dialami oleh masyarakat karena kurangnya jaringan sosial dan struktur yang mendukung untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan agar produktivitas seseorang meningkat. Kemiskinan dalam hal ini disebabkan karena adanya faktor penghambat kesempatan-kesempatan yang ada, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Hambatan yang datang dari luar kemampuan seseorang misalnya adanya birokrasi atau kemampuan seseorang misalnya adanya birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat mencegah seseorang mendapatkan kesempatan yang ada. Kemiskinan dalam hal ini bukan karena malas bekerja tetapi lebih disebabkan karena struktur atau budaya yang berlaku. Sebaliknya faktor yang datang dari diri seseorang misalnya rendahnya tingkat pendidikan baik formal maupun non formal atau hambatannya yang dianut oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat tersebut tidak terintegrasi/terisolasi dengan masyarakat luas, apatis, cenderung menyerah pada nasib serta tidak mempunyai daya juang dan kemampuan untuk memikirkan masa depannya.

Berbicara tentang kemiskinan, maka sebenarnya kita berbicara tentang desa. Karena kemiskinan dan keterbelakangan merupakan gambaran ilustrasi yang identik dengan desa-desa kita dewasa ini. Bambang Ismawan memberikan ulasan itu sebagai berikut :

1. Dengan menggunakan ukuran kebutuhan gizi minimum perorang perhari adalah 1900 kalori atau secara populer dengan patokan perkapita/tahun, 360 kg beras untuk penduduk kota 240 kg beras

- untuk penduduk pedesaan. Sayogo (1978) mengatakan bahwa pada tahun 1976 di Indonesia terdapat 45 juta tergolong miskin. Dari jumlah tersebut 38 juta orang atau 84% berada dipedesaan.
2. Selanjutnya kalau pemilikan tanah merupakan unsur terpenting bagi kesejahteraan penduduk pedesaan maka sensus 1980 benar-benar memperhatikan jumlah buruh tani (tak bertanah) dibanding sensus pertanian 1973 membengkak dari 3,2% menjadi 14,9% hampir 5 kali lebih besar.
 3. Mubyarto (Tempo, 1981) mengatakan bahwa 40% penduduk dengan pendapatan tanah terendah pada tahun 1969 menerima 19% dari pendapatan nasional. Tahun 1973 menerima 15% sedangkan tahun 1975, yakni sekitar 11% untuk tahun 1980 diperkirakan lebih rendah lagi dibanding dengan tahun 1976, yakni sekitar 10%. Jadi golongan miskin semakin sedikit dari pendapatan nasional kita.¹⁶

Jadi, usaha penanggulangan kemiskinan berdasarkan ilustrasi di atas pada intinya merupakan usaha untuk mengarahkan fokus dan konsentrasi kebijaksanaan pembangunan pemerintah secara intensif ke daerah pedesaan sebagai basis kemiskinan.

3.2 Pengadaan Program IDT

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks sehingga penanggulangannya memerlukan upaya menyeluruh dan terpadu. Upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan selama ini memberikan petunjuk bahwa peningkatan koordinasi dan keterpaduan masih diperlukan. Oleh karena itu program IDT telah dirancang sebagai perluasan dan peningkatan berbagai program dan upaya penanggulangan kemiskinan yang

¹⁶ Peter Haquel, Pembangunan desa dan Lembaga Sosial Masyarakat, Rajawali, Jakarta, 1988, halaman 2.

langsung ditujukan untuk menangani masalah kemiskinan pada tingkat pedesaan.

Program IDT sebenarnya bukan merupakan program pembangunan pedesaan yang baru. Program-program sejenis yang juga ditujukan untuk daerah pedesaan, selama ini telah banyak dilakukan. Misalnya program inpres desa, inpres jalan, inpres pasar, dan inpres penghijauan. Program IDT yang diselenggarakan oleh pemerintah sejak tahun anggaran 1994/1995 itu, hanyalah peruntukannya yang dikhususkan bagi desa-desa tertentu yang dikategorikan sebagai desa tertinggal.

Program IDT adalah program untuk menumbuhkan dan memperkuat kemampuan penduduk miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan membuka kesempatan berusaha. Dalam rangka itu, program IDT diarahkan pada pengembangan kegiatan sosial ekonomi untuk mewujudkan kemandirian penduduk miskin desa tertinggal dengan menerapkan prinsip gotong-royong, keswadayaan dan partisipasi. Kegiatan sosial ekonomi yang dikembangkan adalah kegiatan produksi dan pemasaran, terutama yang sumber dayanya tersedia dilingkungan masyarakat setempat. Pada prakteknya berupa pemberian bantuan modal kepada kelompok masyarakat miskin agar mempunyai kemampuan untuk berusaha dibimbing/didampingi dalam pengelolaannya baik secara teknik maupun manajerial sampai ke pemasarannya. Modal yang diberikan bersifat bergulir. Artinya, walaupun modal mengembalikan modal agar dapat dimanfaatkan kembali oleh warga masyarakat lainnya. Pada tahap



pertama, setiap desa tertinggal mendapat bantuan dana sebesar 20 juta selama 3 tahun berturut-turut. Dana tersebut didistribusikan kepada usaha-usaha masyarakat miskin yang produktif.

3.3 Tujuan, Sasaran dan Ruang lingkup Program IDT

1. Tujuan Program IDT

Program IDT adalah program untuk menumbuhkan dan memperkuat penduduk miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan membuka kesempatan berusaha. Guna mempercepat upaya itu disediakan modal kerja bagi penduduk miskin mambangun dan mengembangkan kemampuan dirinya. Dalam rangka itu program IDT secara umum bertujuan memanfaatkan segi kelembagaan sosial ekonomi penduduk miskin sebagai wadah penyaluran aspirasi mereka dalam meningkatkan taraf hidupnya melalui usaha produk yang berkelanjutan. Dan pada tingkat kelompok sasaran program IDT berupaya untuk mengembangkan, meningkatkan dan memantapkan kondisi sosial dan ekonomi penduduk miskin yang bermukim di daerah pedesaan dan perkotaan. Selanjutnya di dalam buku panduan IDT dijelaskan tujuan IDT sebagai berikut :

- a. Memadukan gerak langkah semua instansi dan lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
- b. Membuka peluang bagi penduduk miskin di desa tertinggal untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan cara menciptakan memperluas

lapangan kerja produksi melalui peningkatan berbagai kegiatan pembangunan di desa tertinggal.

- c. Mengembangkan, meningkatkan dan memantapkan kehidupan ekonomi penduduk miskin, melalui penyediaan dan bantuan khusus.
- d. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, tanggung jawab, rasa kebersamaan, harga diri dan percaya diri masyarakat.

2. Sasaran Program IDT

Secara lebih khusus, sasaran, program IDT adalah meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi penduduk miskin melalui upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan permodalan, pengembangan usaha dan pemantapan kelembagaan usaha bersama mereka. Program IDT dimaksudkan untuk meningkatkan penanggulangan situasi dan kondisi yang menyebabkan timbulnya kemiskinan.

Dampak yang diharapkan dari program ini adalah penguatan penduduk miskin. Hal ini diharapkan dapat dicapai melalui empat jalur, yaitu : Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan permodalan, pengembangan peluang kerja berusaha dan penguatan kelembagaan kelompok penduduk miskin. Dan diharapkan akan dapat memperkuat kemampuan mereka untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraannya.

3. Ruang Lingkup Program IDT

Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan di atas, ruang lingkup program IDT adalah kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin di desa tertinggal, melalui

pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok, pelayanan desa dan penciptaan suasana yang mendukung dalam penanggulangan kemiskinan yang diharapkan pada upaya peningkatan percepatan dan perluasan lapangan kerja melalui perluasan kegiatan pembangunan di desa yang dikategorikan tertinggal.

Upaya yang dilakukan berupa pemberi perhatian dan bantuan khusus melalui modal usaha, penelitian keterampilan, bimbingan dan pendampingan dalam pelaksanaan usaha yang dapat memacu peningkatan pendapatan.

Untuk dapat mencapai sasaran tersebut di atas, masyarakat di desa tertinggal perlu dibina melalui pengembangan kelompok. Masyarakat diberi kewenangan penuh dalam perumusan kegiatan sosial ekonominya agar mampu berkiprah dalam pembangunan. Kelompok merupakan kumpulan penduduk setempat, yang menyatakan diri dalam usaha dibidang sosial ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan, keswadayaan dan kegotong-royongan mereka. Kelompok beranggotakan sekitar tiga puluh kepala keluarga dan berada di desa, atau berada di tingkat desa yaitu dusun, lingkungan RW atau RT.

Kelompok dapat dipandang sebagai wadah kebersamaan dalam mengolah kegiatan sosial ekonomi. Dalam melaksanakan prinsip-prinsip kebersamaan tiap-tiap anggota ikut bertanggung jawab, saling mempercayai dan saling melayani. Dalam kebersamaan terbuka peluang untuk menghimpun dana dari anggota, dan secara bersama oleh anggota, dan memanfaatkan dana tersebut bagi kepentingan seluruh anggota. Kebersamaan itu menunjukkan

semangat dan kegiatan koperatif yang menjadi dasar bagi gerakan koperasi yang mandiri.

Pembentukan kelompok memperlancar dan mengefektikan upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan, penduduk miskin diharapkan membentuk kelompok. Pembentukan kelompok sebagai wadah dari kelompok dari kelompok sasaran program IDT dimaksudkan agar pelayanan terhadap penduduk miskin dapat terarah, teraksi di antara masyarakat dapat ditingkatkan dan kesetiakawanan serta kegotong royongan dapat membantu dan dikembangkan. Kesatuan dan persatuan di dalam kelompok bermanfaat untuk menggali permasalahan bersama serta merumuskan langkah penanganan masalah diantara anggota. Kehadiran kelompok meningkatkan terjadinya pengawasan pelaksanaan program IDT oleh masyarakat sendiri.

Ketepatan dalam penentuan kelompok sasaran IDT akan sangat menentukan keberhasilan program tersebut. Oleh karena itu, pembentukan kelompok sasaran harus melibatkan pihak yang paling mengetahui mengenai penduduk yang tergolong miskin, di lingkungan setempat. Pembentukan kelompok penduduk miskin yang menjadi sasaran IDT pertama-tama diprakarsai oleh Kepala Desa, dengan dibantu oleh LKMD, PKK, Kader Pembangunan Desa (KPD), dan para pemuka serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam rangka pembentukan kelompok perlu dilakukan pendataan penduduk keluarga miskin dengan memakai kriteria yang disepakati penduduk setempat dibahas dalam musyawarah wadah LKMD. Pembentukan kelompok

sebaiknya dilakukan pula melalui musyawarah desa/dusun/lingkungan/RW/RT dan didasarkan pada daftar penduduk miskin yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dalam pembentukan kelompok hal-hal berikut dapat dipakai sebagai rujukan :

- a. Pembentukan kelompok didasarkan pada kebutuhan keluarga miskin untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.
- b. Harus dihindari kelompok yang dipaksakan.
- c. Di dalam wadah ekonomi itu diselenggarakan kegiatan sosial ekonomi, yaitu usaha produktif, pemupukan modal dan penghimpunan tabungan, sehingga memberikan manfaat secara ekonomis bagi semua anggota kelompok secara lestari dan berkelanjutan.
- d. Kelompok dapat merupakan kelompok yang sudah ada, atau dapat pula disiapkan, ditumbuhkan, dan dibina secara khusus oleh aparat desa dan masyarakat setempat.

Dalam pembentukan kelompok, keluarga miskin dapat digolongkan menjadi penduduk yang sudah mempunyai usaha meskipun kecil-kecilan dan penduduk yang benar-benar tidak mempunyai usaha tetap dan dengan demikian juga sudah mempunyai usaha, kelompok dibentuk dengan memiliki pengurus yang kemudian bersama anggota merencanakan kegiatan simpan pinjam dengan modal kerja dari dana program IDT. Bagi penduduk lainnya diupayakan untuk menciptakan lapangan usaha dan lapangan kerja dengan bantuan penduduk, baik yang ditugaskan oleh camat dari aparat desa dan



kalangan masyarakat desa yang telah sejahtera berhasil dari kehidupan ekonominya untuk itu perlu dikenali kegiatan stimulan yang dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja penduduk miskin.

BAB IV

DAMPAK PROGRAM IDT BAGI MASYARAKAT DESA SERING

4.1 Masuknya IDT di Desa Sering

Program IDT merupakan bagian dari gerakan Nasional untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Sebagai suatu program pengentasan kemiskinan, didalamnya harus ada semangat kebersamaan yang kuat untuk maju, dan upaya bersama untuk menanggulangi kemiskinan untuk dapat menumbuhkan kebersamaan untuk saling memberikan kesempatan berpartisipasi seluas-luasnya dalam pembangunan kepada berbagai pihak, terutama penduduk miskin itu sendiri. Kemiskinan dalam hal ini disebabkan karena adanya faktor penghambat untuk mendapatkan kesempatan yang ada, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Hambatan yang datang dari luar kemampuan seseorang, misalnya adanya birokrasi atau peraturan-peraturan yang dapat mencegah seseorang memanfaatkan kesempatan yang ada. Kemiskinan dalam hal ini bukan karena malas bekerja tetapi lebih disebabkan karena struktur atau budaya yang berlaku. Sebaliknya faktor yang datang dari dalam diri seseorang, seperti rendahnya tingkat pendidikan baik formal maupun non formal. Hal ini terjadi karena masyarakat luas apatis, cenderung menyerah pada nasib serta tidak mempunyai daya juang dan kemampuan untuk memikirkan masa depannya.

Dengan mengenal sifat-sifat dan faktor-faktor penyebab kemiskinan dapat diupayakan penanggulangannya sesuai dengan sifat-sifat dan penyebab

kemiskinan tersebut. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, salah satu upaya pemerintah adalah melalui program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Melalui program ini diharapkan masalah kemiskinan dapat ditanggulangi secara bertahap. Program Desa Tertinggal ini merupakan perluasan program-program yang menangani masalah kemiskinan dimanapun mereka berada, dan menempatkan penduduk miskin sebagai subyek atau terlibat langsung dalam mengentaskan dirinya sendiri dari kemiskinan.

Sasaran program IDT adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk miskin melalui upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kemampuan permodalan, pengembangan usaha, dan memanfaatkan kelembagaan usaha bersama mereka. Program IDT dimaksudkan untuk menanggulangi situasi dan kondisi yang menyebabkan timbulnya kemiskinan.

Dampak yang diharapkan dari program ini adalah penguatan penduduk miskin. Hal ini dapat dicapai melalui 4 jalur, yaitu kualitas sumber daya manusia, pengembangan permodalan, pengembangan peluang kerja dan berusaha, dan meningkatkan penguatan kelembagaan kelompok penduduk miskin. Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kemampuan permodalan dalam kelembagaan kelompok yang berkembang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penduduk miskin, diharapkan akan dapat memperkuat kemampuan mereka untuk menanggulangi kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraannya.

Salah satu desa dari sekian banyak desa yang ingin mengejar ketertinggalan tersebut adalah Desa Sering Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng. Desa Sering merupakan salah satu dari kedelapan Desa tertinggal yang ada di Kabupaten Soppeng, akan tetapi yang pertama masuk kategori desa tertinggal adalah Desa Sering, yaitu pada awal ditetapkannya IDT tersebut pada tahun 1994, sedangkan ketujuh desa lainnya baru masuk IDT pada tahun anggaran 1995/1996.

IDT dimaksudkan untuk meningkatkan penanganan kemiskinan secara berkelanjutan di desa tertinggal. Melalui IDT ini akan dipadukan program sektoral ataupun regional yang mencakup desa-desa tersebut sehingga secara efektif akan berdampak terhadap penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, disediakan pula dana sebagai modal masyarakat desa untuk membangun kemampuan dirinya. Sejalan dengan dana Inpres Desa yang merupakan program pemerataan yang amat penting selama ini, dan akan dilanjutkan dalam Repelita VI, dana IDT diharapkan dapat dipertahankan kesinambungan pemanfataannya sehingga abadi karena digunakan secara bergulir, sebagai benih bagi pemupukan kemampuan yang lebih besar.

Pelaksanaan program IDT dilakukan langsung oleh masyarakat desa tertinggal itu sendiri, dibantu oleh aparat pemerintah daerah pada tingkat yang paling dekat dengan rakyat. Karena itu, peranan aparat pemerintah desa/kelurahan akan sangat penting, yang harus dtunjang oleh lembaga

masyarakat yang ada di desa/kelurahan, seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Program IDT merupakan perluasan dan peningkatan berbagai program dan upaya serupa yang telah dilaksanakan selama ini, seperti Program Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT), Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor KB (UPPKAKB), dan program yang serupa dilaksanakan oleh PKK. Program PKT dan program lain yang menangani langsung masalah kemiskinan pada tingkat pedesaan di desa tertinggal selanjutnya akan diintegrasikan kedalam program IDT.

Masyarakat miskin seperti buruh tani, petani berlahan sangat kecil, nelayan, buruh nelayan, perambah hutan, masyarakat terasing dan mereka yang putus sekolah akan tetap diperhatikan dimanapun mereka berada, dalam berbagi program sektoral dan regional.

Dengan berbagai program pembangunan, baik sektoral, regional maupun program IDT, diharapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua masalah kemiskinan dapat diselesaikan secara tuntas.

Masuknya desa Sering sebagai kategori desa tertinggal oleh pemerintah, dikarenakan situasi dan kondisi fisik serta keadaan penduduk pada umumnya mengharuskan menerima bantuan dana dari pemerintah untuk kesejahteraan hidup rakyat, misalnya jalan yang tidak beraspal, sehingga transportasi tidak lancar dan perputaran roda ekonomi menyebabkan ketertinggalan dibanding

desa-desa lainnya yang ada dikabupaten Soppeng, penerangan (listrik) tidak ada, sehingga masyarakat kurang informasi tentang perkembangan situasi daerah lain termasuk daerah (kota-kota) besar lainnya. Masyarakat juga kurang menikmati fasilitas yang menggunakan tenaga listrik, dimana seharusnya mereka telah menikmatinya. Karena kurangnya informasi tersebut menyebabkan masyarakat kurang menerima pendidikan (mendapatkan pendidikan yang pantas). Inilah yang merupakan syarat (masalah) dari sekian banyak masalah yang menyebabkan Desa Sering masuk dalam kategori desa tertinggal.

4.2 Pelaksanaan IDT di Desa Sering 1994-1997

Melihat kondisi ekonomi penduduk Desa Sering dibandingkan dengan desa-desa lain disekitarnya, hampir seluruhnya bisa digolongkan miskin. Tetapi untuk mengefektifkan pelaksanaan program IDT atau penggunaan dana program, sesuai dengan prinsip program IDT untuk memprioritaskan penduduk yang lebih miskin, maka sesuai dengan pendataan yang dilakukan oleh kepala desa dibantu oleh anggota LKMD, KPD, dan tokoh masyarakat setempat, maka dijarang sebanyak 181 kepala keluarga (KK) menurut kriteria yang disepakati dan dibahas dalam musyawarah desa dalam wadah LKMD, tergolong sebagai masyarakat atau penduduk desa miskin dan menjadi prioritas utama untuk dijadikan sebagai sasaran program IDT. Ini berarti bahwa dari 232 KK yang ada di Desa Sering hampir semuanya merupakan KK sasaran pelaksanaan program IDT. Yaitu 181 KK atau 78,01% dari jumlah KK yang ada di Desa

Sering. Hanya 51 KK atau 21,98% tergolong berada diatas garis kemiskinan. Untuk itu, dalam pelaksanaan program IDT, mengingat besarnya jumlah dana program IDT yang sangat terbatas dan alasan-alasan lainnya yang mendasar, maka diadakan tahap pergiliran kepada kelompok penduduk miskin. Pada tahap I dana IDT yang berjumlah Rp. 20.000.000 digulirkan kepada 82 KK, miskin. Kemudian dana program IDT ini akan digulirkan dalam 3 tahap, pada tahap II yang digulirkan kepada 64 KK sedangkan pada tahap III digulirkan pada 35 KK miskin.

Khususnya di Desa Sering, walaupun tingkat pendapatan KK sebelum pelaksanaan program IDT diatas standar income perkapita penduduk miskin yaitu Rp. 13.295 perbulan, akan tetapi dengan penghasilan pada umumnya dibawah Rp. 35.000 perbulan dirasa cukup untuk menghidupi keluarga mereka pada .

Tabel 6

Tingkat Pendapata KK Sebelum Pelaksanaan Program IDT

| No | Pendapatan KK | Jumlah KK | Prosentase |
|----|------------------------|-----------|------------|
| 1. | Rp. 5.000- Rp. 15.000 | 13 | 15,85 |
| 2. | Rp. 16.000- Rp. 25.000 | 48 | 58,45 |
| 3. | Rp. 26.000- Rp. 36.000 | 16 | 19,5 |
| 4. | Diatas Rp. 36.000 | 5 | 6,10 |
| | Jumlah | 82 | 100 |

Sumber: Hasil Wawancara/Kuisisioner, Kantor Desa Sering, November 1994

Data dari

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pendapatan penduduk Desa Sering sebelum pelaksanaan program IDT rata-rata antara Rp. 5000 dengan Rp.36.000. hanya 5 KK atau 6,10% yang berpenghasilan diatas Rp. 36.000 perbulan, 13 KK atau 15,85% berpenghasilan antara Rp.5.000 - Rp. 15.000. sedangkan yang berpenghasilan diantara Rp.16.000-25.000 sebanyak 48 KK atau 58,54%. Adapun yang berpenghasilan antara Rp. 26.000 - Rp. 35.000 perbulan sebanyak 16 KK atau 19,5%.

Realisasi jumlah KK penduduk miskin yang menerima dana IDT di Desa Sering ada pada tabel berikut ini :

Tabel 7

Realisasi Pengguliran Dana IDT di Desa Sering

| NO | Tahap/Waktu Pengguliran | Jumlah KK Penerima IDT | Prosentase |
|----|------------------------------|---------------------------|------------|
| 1. | Tahap I Tahun 1994-1995 | 82 | 45,30 |
| 2. | Tahap II Tahun 1995-1996 | 64 | 35,30 |
| 3. | Tahap III Tahun 1996-1997 | 35 | 19,34 |
| | Jumlah | 181 | 100 |

Sumber : Kantor Desa Sering

Data asip
Pada tahap I dimulai pada bulan November 1994 sebanyak 82 KK atau 45,30% dari seluruh jumlah KK sasaran program IDT di Desa Sering. Sedangkan pada tahap II yang dimulai awal Oktober 1995 sebanyak 64 KK

atau 35,36% dan pada tahap III dimulai pada akhir Oktober 1996 sebanyak 35 KK atau 19,34%. Pada tahap II ini telah dijangkau seluruh penduduk miskin sasaran IDT.

Sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa sebelum dana digulirkan dibentuk kelompok setiap desa/kelurahan tertinggal. Untuk memperlancar dan mengefektifkan upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan, penduduk miskin diharapkan membentuk kelompok. Pembentukan kelompok sebagai wadah dari kelompok sasaran program IDT dimaksudkan agar pelayanan terhadap penduduk miskin dapat terarah, interaksi antara masyarakat dapat ditingkatkan, dan kesetiakawanan dan kegotong royongan dapat dibangun dan dikembangkan. Kesatuan dan persatuan didalam kelompok bermanfaat untuk mengenali permasalahan bersama serta merumuskan langkah penanganan masalah diantara anggota. Kehadiran kelompok memungkinkan terjadinya pengawasan pelaksanaan program IDT oleh masyarakat sendiri.

Ketepatan dalam penentuan kelompok sasaran program IDT akan sangat menentukan keberhasilan program tersebut. Oleh karena itu pembentukan kelompok sasaran harus melibatkan pihak yang paling mengetahui mengenai penduduk yang tergolong miskin di lingkungan setempat. Pembentukan kelompok penduduk miskin yang menjadi sasaran program IDT pertama-tama diprakarsai oleh kepala desa/lurah, dengan dibantu oleh LKMD, PKK, Kader Pembangunan Desa (KPD), dan para pemuka serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam setiap kelompok disertakan satu orang pendamping dimana pendamping tersebut bertugas menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator. Penduduk miskin pada umumnya mempunyai keterbatasan dalam mengembangkan dirinya. Oleh karena itu diperlukan tenaga pendamping yang bertugas membina penduduk miskin dalam kelompok, sehingga menjadi suatu kebersamaan yang berorientasi pada upaya perbaikan kehidupan.

Para pendamping diambil dari petugas lapangan pada tingkat kecamatan dan desa dari berbagai departemen dan lembaga kemasyarakatan. Pendamping yang paling efektif adalah dari anggota masyarakat itu sendiri, yaitu anggota masyarakat yang lebih sejahtera dan telah berhasil dalam kehidupan dan kegiatan ekonominya. Maka di Desa Sering terbentuk dalam 17 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), yaitu pada tahap I tahun anggaran 1994-1995 6 KSM, tahap II tahun anggaran 1995-1996 juga 6 KSM dan pada tahap III tahun anggaran 1996-1997 sebanyak 5 KSM.

Tabel 8

Pengalokasian Penerima Dana IDT, KSM Tahap I (1994/1995)

| No | Nama KSM | Jumlah KK | Jumlah Dana yang Diterima | Prosentase |
|----|-------------------|--------------|------------------------------|------------|
| 1. | Mujur Jaya | 14 | Rp. 3.360.000 | 16,8 |
| 2. | Sipurio Sipurennu | 14 | Rp. 3.390.000 | 16,95 |
| 3. | Bunga Cabberu | 13 | Rp. 3.090.000 | 15,45 |
| 4. | Mattunru-tunrue | 15 | Rp. 3.680.000 | 18,4 |
| 5. | Malitutue | 13 | Rp. 3.110.000 | 15,55 |
| 6. | Mattirowalie | 13 | Rp. 3.370.000 | 16,85 |
| | Jumlah | 82 | Rp. 20.000.000 | 100 |

Sumber : Kantor Desa Sering

Tabel 9

Pengalokasian Penerima Dana IDT, KSM Tahap II (1995/1996)

| No | Nama KSM | Jumlah KK | Jumlah Dana yang Diterima | Prosentase |
|----|---------------|--------------|------------------------------|------------|
| 1. | Matiro Deceng | 11 | Rp. 3.200.000 | 16 |
| 2. | Tenri Gangka | 11 | Rp. 3.050.000 | 15,25 |
| 3. | Sipakalebbi | 10 | Rp. 2.900.000 | 14,5 |
| 4. | Kuru Sumange | 8 | Rp. 2.650.000 | 13,25 |
| 5. | Sipakainge | 14 | Rp. 3.850.000 | 19,25 |
| 6. | Pada Idi | 10 | Rp. 4.350.000 | 21,75 |
| | Jumlah | 64 | Rp. 20.000.000 | 100 |

Sumber : Kantor Desa Sering

2.650.000 atau 13,25% dengan 8 KK, Sipakainge sebanyak Rp. 3.850.000 atau 19,25% dengan 14 KK dan KSM Padaldi sebanyak Rp. 4.350.000 atau 21,75% dengan 10 KK. Sedangkan pada tahap III telah terbagi seluruhnya kepada 5 KSM dengan 35 KK, antara lain KSM Sajang Rennu menerima sebanyak Rp. 4.600.000 atau 23% dengan 7 KK, Sipatuo menerima Rp. 2.850.000 atau 14,25% dengan 6 KK, Sipakadeceng menerima Rp. 3.600.000 atau 18% dengan 8 KK, Mannennungeng menerima Rp. 4.400.000 atau 22% dengan 7 KK, dan KSM Ada Nagau sebanyak Rp. 4.550.000 atau 22,75% dengan 7 KK. Dari keterangan tersebut dapat kita lihat bahwa dana IDT telah diterima oleh KK penduduk miskin secara keseluruhan tanpa harus melalui birokrasi yang berbelit-belit.

Dana program IDT yang telah diterima disediakan dari APBN dan disalurkan kepada kelompok melalui bank atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk pemerintah. Dana bagi kelompok diberikan dalam bentuk modal kerja disertai pembimbingan dan pendampingan khusus, dan disalurkan kepada kelompok secara bertahap sesuai dengan rencana kerja yang telah diketahui oleh kepala desa dan camat.

Dana program IDT hanya boleh dicairkan oleh bendaharawan kelompok setelah disetujui oleh kepala desa/lurah. Dalam pengajuan permintaan pencairan dana, kelompok melampirkan rencana kerja yang telah disetujui oleh forum diskusi UDKP. Setiap pencairan dana program IDT harus diterima

langsung dan secara utuh oleh pengurus kelompok. Kelompok membuat pernyataan bahwa penerimaan uang sesuai dengan rencana.

Dalam penyusunan rencana kegiatan dan penggunaan dana program IDT, ada beberapa prinsip pokok yang perlu menjadi pegangan. Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut :

1. Prinsip Keterpaduan

Kegiatan dalam rangka program IDT harus terkait dan terpadu dengan kegiatan lain di desa/kelurahan sehingga saling mendukung dan memberikan manfaat secara optimal.

2. Prinsip Kepercayaan

Masyarakat desa sebagai kelompok sasaran diberi kepercayaan memilih dan menentukan jenis kegiatan yang sesuai dengan potensi desa/kelurahan, masalah yang dihadapi dan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat desa itu sendiri.

3. Prinsip Kebersamaan dan Kegotong-royongan

Setiap kegiatan harus berasal dari dan untuk masyarakat desa secara bersama. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui program IDT adalah kegiatan yang mampu menumbuhkan kebersamaan, kegotong-royongan, kesetiakawanan dan kemitraan diantara kelompok.



4. **Prinsip kemandirian**

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan yang dapat mendorong kelompok sasaran untuk menolong dirinya sendiri sehingga tidak ada kemungkinan menjadi miskin kembali.

5. **Prinsip Ekonomi**

Jenis kegiatan hidup yang dipilih oleh kelompok sasaran harus dapat meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya sehingga taraf hidup kelompok sasaran lebih baik dari keadaan sebelumnya.

6. Kegiatan kelompok sasaran harus dapat meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Bagi KSM yang ada di Desa Sering yang telah menerima dana Program IDT telah menyusun rencana kegiatan atau jenis usaha yang akan dikelola oleh masing-masing KSM atau masing-masing KK.

Tabel 11
Jumlah Dana untuk Tiap Jenis Kegiatan (Usaha)
Tahap I (1994/1995)

| No | Jenis Kegiatan | JKK | Jumlah DTKK | Jumlah | Prosentase |
|----|-----------------------|-----------|----------------------|----------------------|------------|
| 1. | Memelihara Ulat Sutra | 52 | Rp. 230.000 | Rp.11.960.000 | 59,8 |
| 2. | Membuat Gula Merah | 11 | Rp. 225.000 | Rp. 2.475.000 | 12,37 |
| 3. | Petani Murbei | 8 | Rp. 275.000 | Rp. 2.200.000 | 11 |
| 4. | Jual Campuran | 5 | Rp. 300.000 | Rp. 1.500.000 | 7,5 |
| 5. | Peternak Ayam | 1 | Rp. 300.000 | Rp. 300.000 | 1,5 |
| 6. | Tukang Kayu | 3 | Rp. 330.000 | Rp. 990.000 | 4,95 |
| 7. | Berkebun Ubi | 1 | Rp. 275.000 | Rp. 275.000 | 1,38 |
| 8. | Jual Ikan | 1 | Rp. 300.000 | Rp. 300.000 | 1,5 |
| | Jumlah | 82 | Rp.2. 235.000 | Rp.20.000.000 | 100 |

Sumber : Kantor Desa Sering

Keterangan :

JKK = Jumlah KK (Kepala Keluarga)

Jumlah DTKK = Jumlah Dana Tiap KK

Tabel 12
Jumlah Dana untuk Tiap Jenis Kegiatan (Usaha)
Tahap II (1995/1996)

| No | Jenis Kegiatan | JKK | Jumlah DTKK | Jumlah | Prosentase |
|----|-----------------------|-----|---------------|---------------|------------|
| 1. | Memelihara Ulat Sutra | 38 | Rp. 275.000 | Rp.10.450.000 | 52,25 |
| 2. | Membuat Gula Merah | 4 | Rp. 250.000 | Rp. 1.000.000 | 5 |
| 3. | Petani Murbei | 6 | Rp. 300.000 | Rp. 1.800.000 | 9 |
| 4. | Jual Campuran | 2 | Rp. 450.000 | Rp. 900.000 | 4,5 |
| 5. | Peternak Ayam | 3 | Rp. 250.000 | Rp. 750.000 | 3,75 |
| 6. | Tukang Kayu | 2 | Rp. 650.000 | Rp. 1.300.000 | 6,5 |
| 7. | Peternak Bebek | 1 | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 | 1,25 |
| 8. | Jual Ikan | 6 | Rp. 425.000 | Rp. 2.550.000 | 12,75 |
| 9. | Jual Beras | 2 | Rp. 500.000 | Rp. 1.000.000 | 5 |
| | Jumlah | 64 | Rp. 3.350.000 | Rp.20.000.000 | 100 |

Sumber : Kantor Desa Sering

Keterangan :

JKK = Jumlah KK (Kepala Keluarga)

Jumlah DTKK = Jumlah Dana Tiap KK

Tabel 13
Jumlah Dana untuk Tiap Jenis Kegiatan (Usaha)
Tahap III (1996/1997)

| No | Jenis Kegiatan | JKK | Jumlah DTKK | Jumlah | Prosentase |
|----|-----------------------|-----|---------------|---------------|------------|
| 1. | Memelihara Ulat Sutra | 15 | Rp. 700.000 | Rp.10.500.000 | 52,5 |
| 2. | Membuat Gula Merah | 9 | Rp. 400.000 | Rp. 3.600.000 | 18 |
| 3. | Petani Murbei | 2 | Rp. 300.000 | Rp. 600.000 | 3 |
| 4. | Jual Campuran | 2 | Rp. 950.000 | Rp. 1.900.000 | 9,5 |
| 5. | Peternak Ayam | 2 | Rp. 450.000 | Rp. 900.000 | 4,5 |
| 6. | Tukang Kayu | 2 | Rp. 700.000 | Rp. 1.400.000 | 7 |
| 7. | Berkebun Ubi | 2 | Rp. 350.000 | Rp. 700.000 | 3,5 |
| 8. | Jual Ikan | 1 | Rp. 400.000 | Rp. 400.000 | 2 |
| | Jumlah | 35 | Rp. 4.250.000 | Rp.20.000.000 | 100 |

Sumber : Kantor Desa Sering

Keterangan :

JKK = Jumlah KK (Kepala Keluarga)

Jumlah DTKK = Jumlah Dana Tiap KK

Dari tabel 11, 12 dan 13 dapat kita lihat bahwa jenis kegiatan atau usaha yang paling banyak dikelola penduduk miskin (KK) adalah memelihara ulat sutera dengan 52 KK pada tahap I, 38 KK pada tahap II dan 15 KK pada tahap III dengan dana yang diperoleh setiap KK adalah Rp. 230.000 pada tahap I, Rp. 275.000 pada tahap II dan Rp. 700.000 pada tahap III, sehingga jenis kegiatan memelihara ulat sutera inilah yang paling banyak memakai dana yaitu Rp. 11.000.960.000 atau 59,8% dari dana keseluruhan yang diterima pada tahap I, Rp. 10.450.000 atau 52,25% dari dana keseluruhan yang diterima

pada tahap II, dan Rp. 10.500.000 atau 52,5% dari dana keseluruhan yang diterima pada tahap III. Sedangkan jenis usaha (kegiatan yang sedikit memakai dana adalah berkebun ubi dengan 1 KK pada tahap I, dengan dana yang dipakai Rp. 275.000 atau 1,38% dari total dana yang diterima, ternak bebek dengan 1 KK pada tahap II dengan dana yang dipakai Rp. 250.000 atau 1,25% dari total dana yang diterima dan jual ikan pada tahap III dengan dana yang dipakai Rp.400.000 atau 2% dari total dana yang diterima. Adapun kalau kita menghitung per KK, maka dana yang paling banyak diterima KK adalah jenis usaha pertukangan kayu pada tahap I dan II, dimana setiap KK memperoleh Rp.330.000 pada tahap I dan Rp.650.000 pada tahap II, serta jual campuran pada tahap III, dimana setiap KK memperoleh Rp.950.000. Sedang yang paling sedikit adalah membuat gula merah pada tahap I dimana setiap KK hanya memperoleh Rp.225.000, pada tahap III petani murbei hanya memperoleh Rp.300.000, sedangkan pada tahap II ada 3 jenis usaha yang memperoleh dana yang sama yaitu masing-masing hanya menerima Rp.250.000, yaitu membuat gula merah, peternak ayam dan peternak bebek.

Penentuan jenis usaha harus mengacu pada berbagai prinsip program IDT, sehingga untuk mengembangkan suatu jenis usaha harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Cepat menghasilkan, yaitu jarak waktu antara pengeluaran yang harus dilakukan dengan penerimaan hasil kegiatan tidak terlalu lama.
- b. Mendayagunakan potensi yang ada dan dimiliki oleh desa/kelurahan.

- c. Menghasilkan produk yang dapat dipasarkan atau memenuhi permintaan pasar sehingga memberikan nilai tambah.
- d. Dapat memenuhi kebutuhan dasar yang sifatnya mendesak dan melibatkan sebanyak-banyaknya penduduk miskin.
- e. Memberikan hasil dan dapat digulirkan pada seluruh anggota kelompok.
- f. Dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah dikenal dan dikuasai oleh masyarakat dengan memanfaatkan pengetahuan asli yang telah ada dan secara teknis dapat dengan mudah dilaksanakan.
- g. Disesuaikan dengan potensi dan kondisi ekologi setempat sehingga tidak merusak kelestarian lingkungan hidup.
- h. Saling mendukung dan tidak bersaing dengan kegiatan lain yang dilaksanakan melalui program pembangunan sektoral dan regional.
- i. Secara sosial budaya dapat diterima oleh masyarakat.

Dana program untuk mengembangkan usaha tidak digunakan untuk membangun prasarana fisik, karena pembangunan prasarana fisik diupayakan melalui program pembangunan lain, baik yang khusus diajukan untuk menunjang program ini maupun pembangunan sektoral dan regional lainnya.

Desa Sering sebagai desa tertinggal sebagaimana lazimnya desa-desa tertinggal yang ada di Indonesia, maka telah dibentuk suatu kelompok yaitu berupa KSM (Kelompok Swdaya Masyarakat). Dalam setiap KSM telah pula diatur tentang kegiatan atau jenis usaha yang dikelola bagi tiap KK.



Tabel 14

Pembagian Jenis Kegiatan (Jenis Usaha) Setiap KSM

Tahap I (1994/1995)

| No | Nama KSM | Jenis Usaha | JKK | J.Dana |
|--------|-------------------|------------------------|-----|----------------|
| 1. | Mujur Jaya | Memelihara Ulat Sutra | 12 | Rp. 2.760.000 |
| | | Jual Campuran | 1 | Rp. 300.000 |
| | | Jual Ikan | 1 | Rp. 300.000 |
| 2. | Sipurio Sipurennu | Memelihara Ulat Sutra | 12 | Rp. 2.760.000 |
| | | Tukang Kayu | 1 | Rp. 330.000 |
| | | Jual Campuran | 1 | Rp. 300.000 |
| 3. | Bunga Cabberu | Memelihara Ulat Sutra | 12 | Rp. 2.760.000 |
| | | Tukang Kayu | 1 | Rp. 330.000 |
| 4. | Mattunru-Tunrue | Memelihara Ulat Sutra | 10 | Rp. 2.300.000 |
| | | Jual Campuran | 2 | Rp. 600.000 |
| | | Membuat Gula Merah | 2 | Rp. 450.000 |
| | | Tukang Kayu | 1 | Rp. 330.000 |
| 5. | Malitutue | Memelihara Ulat Sutera | 2 | Rp. 460.000 |
| | | Membuat Gula Merah | 8 | Rp. 1.800.000 |
| | | Jual Campuran | 1 | Rp. 300.000 |
| | | Petani Murbei | 2 | Rp. 550.000 |
| 6. | Mattirowalie | Memelihara Ulat Sutera | 4 | Rp. 920.000 |
| | | Berkebun Ubi | 1 | Rp. 275.000 |
| | | Ternak Ayam | 1 | Rp. 300.000 |
| | | Membuat Gula Merah | 1 | Rp. 225.000 |
| | | Petani Murbei | 6 | Rp. 1.650.000 |
| Jumlah | | | 82 | Rp. 20.000.000 |

Sumber : Kantor Desa Sering

Keterangan :

JKK : Jumlah KK (Kepala Keluarga)

J.Dana : Jumlah Dana

Tabel 15
 Pembagian Jenis Kegiatan (Jenis Usaha) Setiap KSM
 Tahap II (1995/1996)

| No | Nama KSM | Jenis Usaha | JKK | J.Dana |
|--------|----------------|------------------------|-----|----------------|
| 1. | Mattiro Deceng | Memelihara Ulat Sutra | 10 | Rp. 2.750.000 |
| | | Jual Campuran | 1 | Rp. 450.000 |
| 2. | Tenri Gangka | Memelihara Ulat Sutra | 8 | Rp. 2.200.000 |
| | | Petani Murbei | 2 | Rp. 600.000 |
| | | Ternak Ayam | 1 | Rp. 250.000 |
| 3. | Sipakalebbi | Memelihara Ulat Sutra | 8 | Rp. 2.200.000 |
| | | Ternak Bebek | 1 | Rp. 250.000 |
| | | Jual Campuran | 1 | Rp. 450.000 |
| 4. | Kuru Sumange | Jual Beras | 2 | Rp. 1.000.000 |
| | | Petani Murbei | 3 | Rp. 900.000 |
| | | Membuat Gula Merah | 3 | Rp. 750.000 |
| 5. | Sipakainge | Memelihara Ulat Sutera | 12 | Rp. 3.300.000 |
| | | Membuat Gula Merah | 1 | Rp. 250.000 |
| | | Petani Murbei | 1 | Rp. 300.000 |
| 6. | Pada Idi | Tukang Kayu | 2 | Rp. 1.300.000 |
| | | Jual Ikan | 6 | Rp. 2.550.000 |
| | | Ternak Ayam | 2 | Rp. 500.000 |
| Jumlah | | | 64 | Rp. 20.000.000 |

Sumber : Kantor Desa Sering

Keterangan :

JKK : Jumlah KK (Kepala Keluarga)

J.Dana : Jumlah Dana

Tabel 16
 Pembagian Jenis Kegiatan (Jenis Usaha) Setiap KSM
 Tahap III (1996/1997)

| No | Nama KSM | Jenis Usaha | JKK | J.Dana |
|----|---------------|------------------------|-----|----------------|
| 1. | Sajang Rennu | Memelihara Ulat Sutra | 6 | Rp. 4.200.000 |
| | | Jual ikan | 1 | Rp. 400.000 |
| 2. | Sipatuo | Berkebun ubi | 2 | Rp. 700.000 |
| | | Jual Campuran | 1 | Rp. 950.000 |
| | | Membuat gula merah | 3 | Rp. 1.200.000 |
| 3. | Sipakadeceng | Membuat gula merah | 4 | Rp. 1.600.000 |
| | | Pctani Murbei | 2 | Rp. 600.000 |
| | | Tukang kayu | 2 | Rp. 1.400.000 |
| 4. | Mannennungeng | Memelihara Ulat Sutra | 5 | Rp. 3.500.000 |
| | | Ternak ayam | 2 | Rp. 900.000 |
| 5. | Ada Nagau | Memelihara Ulat Sutera | 4 | Rp. 2.800.000 |
| | | Membuat Gula Merah | 2 | Rp. 800.000 |
| | | Jual campuran | 1 | Rp. 950.000 |
| | | Jumlah | 35 | Rp. 20.000.000 |

Sumber : Kantor Desa Sering

Keterangan :

JKK : Jumlah KK (Kepala Keluarga)

J.Dana : Jumlah Dana

4.3 Faktor Penhambat dan Keberhasilan Pelaksanaan IDT di Desa Sering

1. Faktor Penhambat Pelaksanaan Program IDT di Desa Sering

Perubahan sikap anggota kelompok masyarakat terhadap kepentingan sosial ekonomi keluarga mereka tidak diawali dengan kisah sukses, tetapi ada berakhir dengan kisah-kisah yang menyedihkan. Kegagalan mengembangkan usaha ekonomi keluarga dari dana IDT tahun anggaran 1994/1995 seolah-olah

memupus harapan mereka untuk dapat mengembangkan ekonomi keluarganya. Kegagalan ini membuat mereka malu dan terpaksa mencari kerja alternatif untuk mengganti dana yang dipinjam dari IDT. Kegagalan pemanfaatan dana IDT tidak sepenuhnya salah anggota pokmas, tetapi dikarenakan kesalahan dalam proses pemanfaatan dan sejak pertama kalinya, dimana campur tangan oknum pemerintah terlalu berlebihan.

Moral penduduk miskin sangat mengagumkan, sebab mereka menganut paham "berani berbuat berani bertanggung jawab". Artinya, kendatipun proses pemanfaatan dana IDT tidak sesuai dengan selera mereka, dan akhirnya dana tersebut terpaksa dipakai untuk membeli bibit ulat sutra, kemudian ulat sutra tersebut mati, namun mereka tetap berjanji dan bersedia mengembalikan harga ulat sutra termasuk segala ongkos kerjanya dengan cara mencicil. Walaupun mereka merasa program ini bertujuan baik sekali, tapi pada akhirnya dirasakan sebagai beban sosial. Pertanyaan yang paling sering terdengar ditengah anggota KSM adalah mengapa dana IDT malah menentang kami, bukan menguntungkan kami.

Secara umum kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan program Inpres desa tertinggal adalah :

- a. Dalam penetapan penduduk miskin, dimana masih terdapat keloggaran dan keluwesan yang terlalu besar. Disemua desa selalu ada alasan untuk tidak memberikan prioritas pada penduduk miskin. Artinya sejumlah warga yang

- tidak miskin yang tidak seharusnya ikut menikmati dana IDT dibiarkan ikut menikmatinya, sehingga jelas mengurangi bagian penduduk miskin.
- b. Penetapan kegiatan/usaha ekonomi kelompok masyarakat harus merupakan usaha yang benar-benar dipilih oleh warga pokmas sendiri, tidak merupakan pilihan aparat pemerintah, dan usaha-usaha ekonomi yang dipilih harus dapat dirubah apabila ternyata usaha yang dipilih pertama tidak memungkinkan.
 - c. Pemilihan pendamping, pendamping lokal, pendamping teknis dari instansi/dinas terkait maupun sajana purna waktu untuk desa-desa miskin parah, harus memperoleh peluang untuk berkarya sebagai mitra kerja kelompok masyarakat yaitu pemerlancar penggugah dan pendorong motifasi serta penghubung pada pihak ketiga. Karena para pendamping inilah merupakan kunci keberhasilan program IDT yang tidak menguntungkan pihak luar dan tidak merupakan program apalagi proyek-proyek pemerintah.

Khusus bagi Desa Sering, kendala yang paling dirasakan dalam pelaksanaan program IDT adalah dimana penduduk miskin penerima dana IDT kurang memahami arti program IDT. Sehingga terkadang dana yang diberikan tidak digunakan seluruhnya untuk usaha/kegiatan mereka, tetapi malah dipakai untuk memperbaiki/membangun rumahnya. Dan hal ini pun tidak dapat kita pungkiri karena sebagian besar penduduk penerima dana IDT berlatar belakang pendidikan rendah atau buta huruf.

Untuk melihat sampai sejauh mana kendala-kendala yang dihadapi penduduk penerima dana IDT di Desa Sering ada pada tabel berikut :

Tabel 17

Kendala yang Dihadapi Responden dalam Pelaksanaan IDT

| No | Kendala-kendala | Responden (KK) | Prosentase |
|----|-------------------------------------|----------------|------------|
| 1. | Tidak ada | 56 | 68,29 |
| 2. | Kurangnya Modal | 20 | 24,39 |
| 3. | Perincian Dana yang Berbelit-belit | - | - |
| 4. | Kurangnya Memahami Arti Program IDT | 6 | 7,32 |
| | Jumlah | 82 | 100 |

Sumber : Hasil wawancara/kuisisioner, Oktober 2001.

Keterangan : Penulis hanya memilih 82 KK pada tahap I sebagai sampel.

Dari tabel 17 menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi oleh KK penerima dana IDT di desa Sering adalah kurangnya modal atau modal yang mereka terima tidak mencukupi untuk mengembangkan usaha yang sedang dilaksanakan dimana sebanyak 20 KK atau 24,39 % yang merasa modal mereka tidak mencukupi. Sedangkan 6 KK atau 7,32 % arti program IDT sehingga mereka tidak mampu mengembangkan usaha yang sedang mereka kelola dan bahkan tidak bisa mengembalikan modal atau dana IDT yang diberikan kepada mereka. Adapun KK yang merasa tidak mempunyai kendala

dalam melaksanakan program IDT di desa Sering sebanyak 56 KK atau 68,29 % sehingga usaha mereka berjalan dengan baik.

2. Keberhasilan Pelaksanaan program IDT di Desa Sering 1994-1997

Program IDT adalah program nasional yang bertujuan secara langsung mengentaskan kemiskinan di desa-desa tertinggal. Program IDT merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dan merupakan program khusus yang dipadukan dengan program-program lainnya yang telah ada di pedesaan, baik sifatnya sektoral maupun regional diarahkan untuk mempercepat dan meningkatkan penanggulangan kemiskinan di desa-desa tertinggal.

Setiap program pembangunan desa menghendaki keikutsertaan dan partisipasi setiap anggota masyarakat. Ditingkat pedesaan inilah terjadi persentuhan langsung antara konsep ideal yang di tawarkan oleh pemerintah melalui program-program pembangun pedesaan dengan masyarakat yang pada hakekatnya merupakan penerjemah dari program pembangunan tersebut. Pelaksanaan pembangunan pedesaan oleh masyarakat desa merupakan penjabaran dari kebijaksanaan pemerintah. Jadi, masyarakat desa merupakan penentu dari keberhasilan suatu program pembangunan desa. Pada kondisi tersebut masyarakat pada suatu sisi lain berperan sebagai obyek atau pelaksana langsung dari pembangunan. Pada saat posisi mereka sebagai obyek maka pada saat itulah mereka memberikan respon terhadap kebijaksanaan yang dikenakan pada mereka. Respon masyarakat terhadap kebijaksanaan yang diterapkan sangat penting artinya. Berhasil tidaknya tujuan yang akan dicapai sangat



tergantung pada ada tidaknya dukungan dari masyarakat sebagai kelompok sosial. Tingkat pengetahuan mereka terhadap program ditambah dengan faktor-faktor lain menentukan tingkat dukungan atau partisipasi mereka terhadap program-program pembangunan. Seperti halnya keadaan Desa Sering sebagai obyek langsung dari pelaksanaan program IDT.

Program IDT bertujuan untuk meningkatkan usaha penanggulangan terhadap masalah kemiskinan di desa. Wujudnya adalah usaha mengangkat kaum miskin dipedesaan melalui peningkatan kemampuan mereka melakukan usaha-usaha yang produktif. Secara khusus sasarannya adalah pemberdayaan potensi yang ada di desa miskin tersebut. Sehingga mampu memberikan sumber penghasilan yang memadai dan diharapkan dapat berlanjut oleh penduduk miskin.

Persepsi masyarakat Desa Sering tentang tujuan daripada program IDT dapat dilihat dalam alasan-alasan kesediaan mereka menerima program IDT.

Tabel 18
Alasan Responden Menerima IDT

| No | Alasan Responden | Jumlah KK | Prosentase |
|----|---|-----------|------------|
| 1. | Dapat meningkatkan/memperbaiki taraf hidup. | 69 | 84,15 |
| 2. | Karena program dari pemerintah. | 2 | 2,44 |
| 3. | Karena ditunjuk oleh pemerintah (Camat)/Kades). | 7 | 8,53 |
| 4. | Karena pengaruh atau dorongan keluarga. | 4 | 4,88 |
| | Jumlah | 82 | 100 |

Sumber : Hasil wawancara/kuisisioner, Oktober 2001.

Keterangan : Penulis hanya memilih 82 KK pada tahap I sebagai sampel.

Dari tabel 18 menunjukkan bahwa 69 KK atau 84,15 % dari jumlah KK penerima IDT tahap I menerima program IDT dengan kesadaran bahwa program IDT tersebut dapat meningkatkan penghasilan dan memperbaiki taraf hidup. Selanjutnya yang menerima program IDT hanya karena merupakan program dari pemerintah sebanyak 2 KK atau 2,44% karena alasan ditunjuk oleh pemerintah setempat, adapun yang menerima program IDT karena pengaruh atau dorongan dari keluarganya sebanyak 4 KK atau 4,88% jumlah KK (Responden) keseluruhan.

Misi program IDT adalah pemberdayaan penduduk miskin, sehingga pada gilirannya mereka mampu bangkit mengejar ketertinggalannya, mampu berswadaya, dan mampu meningkatkan pendapatan keluarga. Selama ini telah

berkembang suatu anggapan dalam tubuh aparat pemerintah di daerah, bahwa masyarakat miskin tersebut tidak inovatif, dan tidak mungkin diberdayakan sepenuhnya tanpa bantuan pemerintah. Asumsi ini memang tidak jauh dari kenyataan disebagian besar desa tertinggal. Masalahnya adalah sejauh mana asumsi tersebut sudah dialami dan dibuktikan, sebab ketidakberdayaan penduduk miskin selama ini justru disebabkan oleh sistem ekonomi dan politik yang tidak berpihak pada kepentingan orang-orang miskin tersebut. Selain itu pendekatan pengambilan keputusan yang birokratis dan instruktif yang selama ini banyak dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, belum mampu menggugah potensi masyarakat tersebut.

Untuk mengikuti gerak dinamika sosial ekonomi dan budaya desa miskin serta penduduk miskin, diperlukan suatu pendekatan pemahaman yang lebih operasional dan mampu mendekati masalahnya secara tuntas. Pendekatan tersebut hanya dilaksanakan apabila cara-cara yang ditempuh seirama dengan dinamika yang ada dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itulah diperlukan pengamatan yang berkesinambungan dalam kurun waktu tertentu didesa-desa tertinggal. Pendekatan yang paling sesuai adalah apabila pengamat meletakkan dirinya sebagai bagian dari proses dinamika itu sendiri, bersama-sama dengan masyarakat.

Keberhasilan upaya mengurangi jumlah penduduk miskin di desa akhir PELITA VI sangat ditentukan oleh kesungguhan, kejelian, kepedulian dan ketepatan (K4) semua pihak dalam penetapan siapa penduduk miskin yang

sesungguhnya di desa. Apabila proses seleksi penetapan penduduk miskin dilakukan dengan cara chaos dan nepotisme, maka niat baik pemerintah akan sia-sia saja. Penduduk miskin akan tetap miskin selamanya.

Untuk melihat bagaimana tingkat keberhasilan penduduk Desa Sering, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apakah dana IDT yang dikirim setiap KK di Desa Sering sudah mencukupi untuk mengelolah usaha/kegiatan mereka.

Untuk melihat dan menilai tentang cukup tidaknya dana yang diterima KK terhadap jenis usaha yang mereka kelolah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 19
Penilaian Responden tentang Cukup Tidaknya Dana yang Diterima dengan Jenis yang Dikelolah

| No | Penilaian Rsponden | Jumlah KK | Prosentase |
|----|--------------------|-----------|------------|
| 1. | Sangat mencukupi | 2 | 2,44 |
| 2. | Mencukupi | 54 | 65,85 |
| 3. | Kurang mencukupi | 20 | 24,39 |
| 4. | Tidak mencukupi | 6 | 7,32 |
| | Jumlah | 82 | 100 |

Sumber : Hasil wawancara/kuisisioner, Oktober 2001.

Keterangan : Penulis hanya memilih 82 KK pada tahap I sebagai sampel.

Dari tabel 19 menunjukkan bahwa penerima dana IDT di Desa Sering sebagian besar merasa puas, ini dapat dilihat dari tanggapan responden yang menyatakan mencukupi 54 KK atau 65,85% dan sangat mencukupi 2 KK atau 2,44%. Sedangkan yang kurang puas terhadap dana IDT yang diberikan

sebanyak 26 KK yang terdiri 20 KK atau 24,39% KK kurang mencukupi dan tidak mencukupi 6 KK atau 7,32% dari seluruh jumlah responden yang ada.

Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program di lapangan dilakukan pemantauan. Pemantauan dilakukan pada setiap kabupaten/kotamadya sampai dengan propinsi, pemantauan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang timbul di lapangan, sedangkan hasilnya digunakan untuk mencocokkan dengan laporan yang ada dan untuk memecahkan masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program ini. Bupati/ Walikotamadya KDH tingkat II melakukan pemantauan dan pengendalian pada tingkat kabupaten, gubernur KDH tingkat I pada tingkat propinsi dan tim pusat pada tingkat nasional.

Untuk mengetahui pelaksanaan IDT khususnya di Desa Sering maka penulis memakai ukuran terhadap distribusi pengembalian dana kepada setiap KK. Bagi KK yang melunasi atau mengembalikan seluruh dana IDT yang digulirkan kepadanya dianggap berhasil, sedangkan yang belum melunasi atau mengembalikan $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{3}$ dana yang digulirkan kepadanya kurang berhasil. Dan yang tidak berhasil adalah mereka yang tidak melunasi dan mengembalikan dana IDT yang digulirkan kepadanya.

Tabel 20
Distribusi Responden tentang Pengembalian Dana IDT yang Diterima

| No | Nama KSM | Jumlah KK | | | | Jumlah KK |
|----|-------------------|-----------|---------|---------|-----|--------------|
| | | Lunas | 1/2 Bls | 1/3 Bls | Tls | |
| 1. | Mujur Jaya | 9 | 2 | 3 | - | 14 |
| 2. | Sipurio Sipurennu | 12 | - | - | 2 | 14 |
| 3. | Bunga Cabberu | 10 | - | 3 | - | 13 |
| 4. | Mattunru-tunrue | 8 | 1 | 5 | 1 | 15 |
| 5. | Malitutue | 8 | - | 4 | 1 | 13 |
| 6. | Mattirowalie | 9 | 2 | - | 2 | 13 |
| | Jumlah | 56 | 5 | 15 | 6 | 82 |

Sumber : Kantor Desa sering

Keterangan : Penulis hanya memilih 82 KK pada tahap I sebagai sampel.

$\frac{1}{2}$ Bls = $\frac{1}{2}$ Belum Lunas

$\frac{1}{3}$ Bls = $\frac{1}{3}$ Belum Lunas

Tls = Tidak Lunas

Dari tabel 20 menunjukkan bahwa sebagian atau hampir seluruh KK penerima dana IDT tahap I telah mengembalikan dana yang digulirkan kepadanya, ini terbukti sebanyak 56 KK atau 68,29% telah melunasi dana IDT tersebut. Sedangkan yang tinggal $\frac{1}{3}$ belum dilunasi sebanyak 15 KK atau 18,29% dan yang tinggal $\frac{1}{2}$ belum dilunasi terdiri dari 5 KK atau 6,09%. Adapun yang belum melunasi sama sekali sebanyak 6 KK atau 7,32%.

Dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program IDT, sistem evaluasi yang telah dikembangkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana



Nasional (BKKBN) dalam kegiatan Usaha Peningkatan Keluarga Berencana Akseptor KB dapat digunakan sebagai acuan, sesuai dengan kondisi setempat. Khususnya di Desa Sering untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan program IDT selama hampir tiga tahun ada pada tabel berikut :

Tabel 21

Ukuran Tingkat Keberhasilan Responden (KK) Terhadap Pelaksanaan Program IDT di Desa Sering Tahap I (1994/1995)

| No | Nama KSM | Tingkat Keberhasilan KSM | | | Jumlah KK |
|----|-------------------|--------------------------|----|----|--------------|
| | | B | KB | TB | |
| 1. | Mujur Jaya | 9 | 5 | - | 14 |
| 2. | Sipurio Sipurennu | 12 | - | 2 | 14 |
| 3. | Bunga Cabberu | 10 | 3 | - | 13 |
| 4. | Mattunru-tunrue | 8 | 6 | 1 | 15 |
| 5. | Malitutue | 8 | 4 | 1 | 13 |
| 6. | Mattirowalie | 9 | 2 | 2 | 13 |
| | Jumlah | 56 | 20 | 6 | 82 |

Sumber : Kantor Desa sering

Keterangan :

B = Berhasil

KB = Kurang Berhasil

TB = Tidak Berhasil

Tabel 22
 Ukuran Tingkat Keberhasilan Responden (KK) Terhadap Pelaksanaan
 Program IDT di Desa Sering Tahap II (1995/1996)

| No | Nama KSM | Tingkat Keberhasilan KSM | | | Jumlah KK |
|----|----------------|--------------------------|----|----|--------------|
| | | B | KB | TB | |
| 1. | Mattiro Deceng | 10 | 1 | - | 11 |
| 2. | Tenri Gangka | 10 | - | 1 | 11 |
| 3. | Sipakalebbi | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 4. | Kuru Sumange | 6 | 2 | - | 8 |
| 5. | Sipakainge | 8 | 4 | 2 | 14 |
| 6. | Pada Idi | 8 | 1 | 1 | 10 |
| | Jumlah | 48 | 11 | 5 | 64 |

Sumber : Kantor Desa sering

Keterangan :

B = Berhasil

KB = Kurang Berhasil

TB = Tidak Berhasil

Tabel 23
 Ukuran Tingkat Keberhasilan Responden (KK) Terhadap Pelaksanaan
 Program IDT di Desa Sering Tahap III (1996/1997)

| No | Nama KSM | Tingkat Keberhasilan KSM | | | Jumlah KK |
|----|---------------|--------------------------|----|----|--------------|
| | | B | KB | TB | |
| 1. | Sajang Rennu | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 2. | Sipatuo | 4 | 2 | - | 6 |
| 3. | Sipakadeceng | 7 | - | 1 | 8 |
| 4. | Mannennungeng | 5 | 2 | - | 7 |
| 5. | Ada Nagau | 6 | - | 1 | 7 |
| | Jumlah | 27 | 5 | 3 | 35 |

Sumber : Kantor Desa sering

Keterangan :

B = Berhasil

KB = Kurang Berhasil

TB = Tidak Berhasil

Dari tabel 21,22,23 menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan Desa Sering sebagai pelaksana dan penerima dana IDT dianggap berhasil. Hal ini terbukti bahwa dari 82 KK penerima dana IDT tahap I hanya 6 atau 7,32% KK yang tidak berhasil, dari 64 KK penerima dana IDT tahap II hanya 5 atau 7,81% KK yang tidak berhasil dan dari 35 KK penerima dana IDT tahap III hanya 3 atau 8,57% KK yang tidak berhasil. Dan yang kurang berhasil

sebanyak 20 KK atau 24,39% pada tahap I, 11 KK atau 17,19% pada tahap II dan 5 KK atau 14,28% pada tahap III. Sedangkan sisanya yang terdiri dari 56 KK atau 68,29% dari keseluruhan penerima IDT tahap I, 48 KK atau 75% dari keseluruhan penerima IDT tahap II dan 27 KK atau 77,14% dari keseluruhan penerima dana IDT tahap III, ketiga tahap tersebut dianggap berhasil, karena mengembalikan seluruh dana IDT yang digulirkan kepada mereka.

Untuk melihat dan mengetahui jenis usaha yang kurang berhasil atau tidak berhasil pada program IDT di Desa Sering pada tabel berikut :

Tabel 24

Jenis Usaha Yang Tidak Berhasil pada Tahap I (1994/1995)

| No | Jenis Usaha | Jumlah KK yang Tidak/Kurang Berhasil | | | | | | Jumlah |
|----|-----------------------|--------------------------------------|----|----|----|----|----|--------|
| | | MJ | SS | BC | MT | ML | MR | |
| 1. | Memelihara Ulat Sutra | | 2 | | | | 1 | 3 |
| 2. | Membuat Gula Merah | | | | 1 | | | 1 |
| 3. | Petani Murbei | | | | | 1 | | 1 |
| 4. | Jual Campuran | | | | | | | |
| 5. | Ternak Ayam | | | | | | 1 | 1 |
| 6. | Tukang Kayu | | | | | | | |
| 7. | Berkebun Ubi | | | | | | | |
| 8. | Jual Ikan | | | | 1 | 1 | 2 | 6 |
| | Jumlah | | 2 | | 1 | 1 | 2 | 6 |

Sumber : Kantor Desa Sering

Keterangan :

MJ = Mujur Jaya

SS = Sipurio Sipurennu

BC = Bunga Cabberu

MT = Mattunru-tunrue

ML = Mallitutue

MR = Mattirowalie

Tabel 25

Jenis Usaha Yang Tidak Berhasil Tahap II (1995/1996)

| No | Jenis Usaha | Jumlah KK yang Tidak/Kurang Berhasil | | | | | | Jumlah |
|----|-----------------------|--------------------------------------|----|----|----|----|----|--------|
| | | MD | TG | SP | KS | SK | PI | |
| 1. | Memelihara Ulat Sutra | | | 1 | | | | 1 |
| 2. | Membuat Gula Merah | | | | | 1 | | 1 |
| 3. | Petani Murbei | | 1 | | | 1 | | 2 |
| 4. | Jual Campuran | | | | | | | |
| 5. | Ternak Ayam | | | | | | | |
| 6. | Tukang Kayu | | | | | | 1 | 1 |
| 7. | Ternak Bebek | | | | | | | |
| 8. | Jual Ikan | | | | | | | |
| | Jumlah | | 1 | 1 | | 2 | 1 | 5 |

Sumber : Kantor Desa Sering

Keterangan :

MD = Mattiro Deceng

TG = Tenri Gangka

SP = Sipakalebbi

KS = Kuru Sumange

SK = Sipakainge

PI = Pada Idi

Tabel 26

Jenis Usaha Yang Tidak Berhasil pada Tahap III (1996/1997)

| No | Jenis Usaha | Jumlah KK yang Tidak Berhasil/Kurang Berhasil | | | | | Jumlah |
|----|-----------------------|---|----|----|----|----|--------|
| | | SR | ST | SD | MN | AN | |
| 1. | Memelihara Ulat Sutra | 1 | | | | | 1 |
| 2. | Membuat Gula Merah | | | | | 1 | 1 |
| 3. | Petani Murbei | | | 1 | | | 1 |
| 4. | Jual Campuran | | | | | | |
| 5. | Ternak Ayam | | | | | | |
| 6. | Tukang Kayu | | | | | | |
| 7. | Berkebun Ubi | | | | | | |
| 8. | Jual Ikan | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | | 1 | 3 |

Sumber : Kantor Desa Sering

Keterangan :

SR = Sajang Rennu

ST = Sipatuo

SD = Sipakadeceng

MN = Mannennungeng

AN = Ada Nagau

Dari tabel 24,25 dan 26 menunjukkan bahwa jumlah jenis usaha yang tidak berhasil pada tahap I, II, dan III, antara lain memelihara ulat sutra, membuat gula merah, perkebunan murbei, dan tukang kayu. Ketidakberhasilan mereka bukan karena disengaja melainkan karena beberapa faktor. Memelihara ulat sutra misalnya, usaha ini merupakan jenis yang banyak diminati masyarakat sebab pemasarannya cukup baik. Namun karena masyarakat kurang hati-hati dalam memelihara ulat sutra ini menyebabkan banyak ulat yang mati sebelum menjadi kepompong dan kita mengetahui bahwa ulat sutra itu terlalu peka terhadap lingkungan sekitarnya. Lain halnya dengan membuat gula merah yang disebabkan karena faktor pemasaran yang tidak memungkinkan. Karena tidak ada perdagangan besar yang langsung menerima hasil gula merah tersebut dan mereka hanya menjual di pasar-pasar terdekat menyebabkan stok gula merah mereka bertumpuk sehingga terkadang pengeluaran lebih banyak dari pemasukan. Bagi petani murbei disebabkan oleh banyaknya saingan, maksudnya hampir seluruh pemelihara ulat sutera mempunyai tanaman murbei sendiri, sehingga mereka baru membeli jika betul-betul kehabisan tanaman murbei miliknya sendiri.

Setelah kita mengetahui tentang jenis usaha penduduk yang berhasil, kurang/tidak berhasil maka kita juga perlu mengetahui sampai sejauh mana tingkat pendapatan mereka setelah pelaksanaan program IDT tersebut.



Tabel 27

Tingkat Pendapatan Responden (KK) Setelah Pelaksanaan IDT tahap I
(1994/1995)

| No | Pendapatan Responden | Jumlah KK | Prosentase |
|----|-------------------------|-----------|------------|
| 1. | Dibawah Rp. 50.000 | 6 | 7,32 |
| 2. | Rp. 51.000 - Rp. 65.000 | 31 | 37,80 |
| 3. | Rp. 66.000 - Rp. 81.000 | 43 | 52,44 |
| 4. | Diatas Rp. 82.000 | 2 | 2,44 |
| | Jumlah | 82 | 100 |

Sumber : Kantor Desa Sering

Tabel 28

Tingkat Pendapatan Responden (KK) Setelah Pelaksanaan IDT tahap II
(1995/1996)

| No | Pendapatan Responden | Jumlah KK | Prosentase |
|----|-------------------------|-----------|------------|
| 1. | Dibawah Rp. 50.000 | 5 | 7,81 |
| 2. | Rp. 51.000 - Rp. 65.000 | 20 | 31,25 |
| 3. | Rp. 66.000 - Rp. 81.000 | 35 | 54,69 |
| 4. | Diatas Rp. 82.000 | 4 | 6,25 |
| | Jumlah | 64 | 100 |

Sumber : Kantor Desa Sering

Tabel 29
Tingkat Pendapatan Responden (KK) Setelah Pelaksanaan IDT tahap III
(1996/1997)

| No | Pendapatan Responden | Jumlah KK | Prosentase |
|----|-------------------------|-----------|------------|
| 1. | Dibawah Rp. 50.000 | 3 | 8,57 |
| 2. | Rp. 51.000 - Rp. 65.000 | 9 | 25,71 |
| 3. | Rp. 66.000 - Rp. 81.000 | 19 | 54,28 |
| 4. | Diatas Rp. 82.000 | 4 | 11,43 |
| | Jumlah | 35 | 100 |

Sumber : Kantor Desa Sering

Dari tabel 27,28 dan 29 dapat kita lihat bahwa dari 82 KK penerima dana IDT hanya 6 KK atau 7,32% pada tahap I, 5 KK atau 7,81% pada tahap II dan 3 KK atau 8,57% pada tahap III yang berpenghasilan dibawah Rp. 50.000, yang berpenghasilan antara Rp. 51.000 - Rp. 65.000 sebanyak 31 KK atau 37,80%, pada tahap I, 20 KK atau 31,25% pada tahap II dan 9 KK atau 25,71% pada tahap III. Sedangkan 43 KK atau 52,44% pada tahap I, 35 KK atau 54,69% pada tahap II dan 19 KK atau 54,28% pada tahap III berpenghasilan antara Rp.66.000 - Rp. 81.000 dan yang berpenghasilan diatas Rp. 82.000 sebanyak 2 KK atau 2,44% pada tahap I, 4 KK atau 6,25% pada tahap II dan 4 KK atau 11,43% pada tahap III. Dengan demikian pelaksanaan program IDT di Desa Sering khususnya bagi penerima dana IDT tahap I dianggap berhasil.

Secara umum di Indonesia, indikator keberhasilan yang dipakai dalam pelaksanaan program IDT adalah :

1. Berkurangnya jumlah penduduk yang termasuk dalam kategori miskin.
2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
3. Meningkatnya kepedulian warga terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dilingkungannya.
4. Meningkatkan kemandirian kelompok ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok lain dalam masyarakat.

BAB V

PENUTUP

Pada bab-bab terdahulu telah disajikan berbagai hal tentang pelaksanaan program IDT, dan telah pula disajikan mengenai pelaksanaan program IDT selama tiga tahun di Desa Sering. Dan bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran tentang hasil penelitian.

A. Kesimpulan

1. Desa Sering adalah salah satu desa yang telah menerima dana IDT selama tiga tahun dari pemerintah sebanyak Rp. 20 juta pertahun secara bertahap, mulai tahun anggaran 1994 - 1995 sampai tahun anggaran 1996 - 1997. Dana tersebut digulirkan kepada kelompok masyarakat miskin sebagai modal usaha disertai pembimbingan dan pendampingan khusus. Adapun pembagian jenis usaha, diantaranya adalah memelihara ulat surta, jual campuran, petani murbei, ternak ayam, jual beras, membuat gula merah dan sebagainya. Pelaksanaan program IDT tersebut, khususnya di Desa Sering dianggap telah terlaksana dengan cukup baik dengan hasil yang cukup baik pula walaupun dalam pelaksanaannya mengalami berbagai kendala.
2. Khusus bagi Desa Sering, kendala yang paling dirasakan dalam pelaksanaan program IDT adalah dimana penduduk miskin penerima dana IDT kurang memahami arti program IDT. Sehingga terkadang

dana yang diberikan tidak digunakan seluruhnya untuk usaha/kegiatan mereka, tetapi malah dipakai untuk memperbaiki/membangun rumahnya. Dan hal inipun tidak dapat kita pungkiri karena sebagian besar penduduk penerima dana IDT berlatar belakang pendidikan rendah atau buta huruf.

3. Dari penelitian yang dilakukan penulis terhadap pelaksanaan Inpres Desa Tertinggal di Desa Sering, maka disimpulkan bahwa pelaksanaan IDT di desa tersebut cukup berhasil, dengan indikator keberhasilan sebagai berikut :
 - a. Berkurangnya jumlah penduduk yang termasuk dalam kategori miskin.
 - b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
 - c. Meningkatkan kepedulian warga masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
 - d. Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat

B. Saran

1. Pelaksanaan IDT oleh pemerintah Orde Baru yang belum menampakkan hasilnya yang maksimal, baik dari masyarakat maupun pemerintah sendiri, dapat dijadikan acuan (bukan perbandingan) untuk menetapkan satu program, sehingga dapat langsung dinikmati oleh masyarakat.
2. Dalam pelaksanaan suatu program pemerintah, seperti IDT, JPS, dan sebagainya, ada baiknya melibatkan orang/instansi/LSM yang betul-betul dapat dipercaya. Sehingga masyarakat tidak dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang hanya ingin mencari keuntungan semata.



DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Sritua. Dr. *Agenda Ekonomi Kerakyatan*. Salatiga : Pustaka Pelajar. 1997.
- Awang, Afri San, Soedjono, Mas dan Pribadi, Hasan. *Program IDT dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Aditya Media. 1995.
- Bintarto, R. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1984.
- Haquel, Peter. *Pembangunan Desa dan Lembaga Sosial Masyarakat*. Jakarta: Rajawali .1988.
- Hamid, Abu. Drs dan Alwy, Mustamin. Drs. *Sosialisasi pada Perkampungan Miskin Daerah Sulawesi-Selatan*. Jakarta : DEPDIKBUD. 1987.
- Hugiono dan Poerwantara, P.K. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta : Rineka Cipta. 1992.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial dan Metodologi Sejarah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 1992.
- Kusnaedi, Ir. *Membangun Desa; Pedoman untuk Penggerak Program IDT, Mahasiswa KKN, dan Kader Pembangunan Desa*. Jakarta : Swadaya. 1995.
- Kartini, Majalah*. No. 574. "Menarik Mereka dari Bawah Garis Kemiskinan". Halaman 120-121. Jakarta : 1996.

- Korten, David dan Syahrir. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 1983.
- Maskum, Sumitro H. *Pembangunan Masyarakat Desa, Asas Kebijakan dan Manajemen*. Yogyakarta : Mw. Mandala. 1993.
- Mubyarto. *Kaji Tindak Program IDT*. Jakarta : Aditya Media. 1996.
- Mubyarto, dkk. *Keswadayaan Masyarakat Desa*. Jakarta : Aditya Media. 1994.
- Mubyarto. *Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan*. BFE untuk UGM.
- Suprayitno, Imam dan Nugroho, Adi. S.P. *Usaha Pedesaan Populer (Mendukung Inpres No. 5 Th. 1993 Tentang Program IDT)*. Solo : CV. Aneka Solo. 1996.
- Salim, Emil. Prof. Dr. *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*. Jakarta : Inti Idayu Press. 1984.
- Soelaeman, Munandar. M. MS. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung : 1992.
- Surjadi, A. Drs. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung : PT. Alumni. 1975.
- Soetrisno, Lukman. dkk. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Yogyakarta : Yayasan Dian Desa.
- TAP MPR No. II/MPR/1993. *Garis-Garis Besar Haluan Negara*.